



KAJIAN PENYUSUNAN PETA POTENSI EKONOMI YANG DAPAT DIKELOLA BUMD KOTA SAMARINDA 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



**KAJIAN PENYUSUNAN PETA POTENSI EKONOMI YANG
DAPAT DIKELOLA BUMD KOTA SAMARINDA**



TIM TENAGA AHLI:

Rustan Amarullah, S.P., M.A., M.SE.

Mayahayati Kusumaningrum, S.E., M.Ec.Dev

Novi Prawitasari, S.Sos

Armelya Trinita Fornia, SH

Riri Andriany, S.IP., M.Si

Novia Leny Christine, S.Si., M.M.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA SAMARINDA**

bekerja sama dengan

PUSLATBANG KDOD LAN SAMARINDA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

HASIL *EXPOSE FINAL REPORT* KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SUB KEGIATAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
TENTANG
KAJIAN PENYUSUNAN PETA POTENSI EKONOMI YANG DAPAT
DIKELOLA BUMD KOTA SAMARINDA

Tim Tenaga Ahli:

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	Rustan Amarullah, S.P., M.A., M.SE.	
Sekretaris	Mayahayati Kusumaningrum, S.E., M.Ec. Dev	
Anggota	1. Novi Prawitasari, S.Sos.	
	2. Armelya Trinita Fornia, S.H.	
	3. Riri Andriany, S.IP., M.Si	
	4. Novia Leny Christine, S.Si., M.M.	

Tanggal Seminar: 05 Juli 2023

Disetujui Oleh:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota
Samarinda

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

Diketahui Oleh:

Asisten II
Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Sekretaris Daerah
Kota Samarinda

Sam Syaimun, SE., M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640517 198503 1 011

Ir. Hero Mardanus Satyawan, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 19660330 199303 1 006

KATA PENGANTAR

Desentralisasi berimbang pada kewenangan daerah untuk menggali potensi ekonomi di masing-masing daerah, salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Adapun tujuan pendirian BUMD adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Saat ini, Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki tiga BUMD, yakni PDAM Tirta Kencana yang bergerak di bidang pengadaan air, Perusda Varia Niaga yang membidangi 22 jenis kegiatan usaha, dan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) yang menyediakan jasa keuangan. Keberadaan ketiga BUMD ini tentunya sejalan dengan misi kedua Kota Samarinda, yaitu mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan. Namun demikian, untuk mendorong kontribusi yang optimal terhadap pendapatan PAD, maka perlu dilakukan ekspansi usaha yang dilakukan BUMD sesuai dengan potensi daerah.

Pemerintah Kota Samarinda memandang perlu untuk menyelenggarakan Kajian Penyusunan Peta Potensi Ekonomi yang dapat Dikelola BUMD Kota Samarinda bekerjasama dengan Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara. Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan peluang ekonomi yang berpeluang dikelola oleh BUMD Kota Samarinda, serta mengidentifikasi strategi penguatan BUMD. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan berupa identifikasi potensi ekonomi berbagai sektor serta membuat prioritas sektor berdasarkan potensi ekonomi terbaik untuk dikembangkan oleh BUMD Kota Samarinda.

Pada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dan masukan hingga kajian ini dapat diselesaikan. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan masukan positif bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki.

Samarinda, Juli 2023
Kepala Bappedalitbang Kota Samarinda

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si

EXECUTIVE SUMMARY

Kajian Penyusunan Peta Potensi Ekonomi yang Dapat Dikelola BUMD Kota Samarinda

Desentralisasi membawa pengaruh pada kewenangan daerah untuk menggali potensi ekonomi di wilayahnya dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini juga dilakukan untuk menghadapi kondisi perekonomian global yang makin terbuka, sehingga diperlukan pengembangan wilayah berbasis ekonomi. Adapun upaya pemerintah daerah untuk mengelola potensi-potensi daerah serta mendorong pembangunan daerah salah satunya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Saat ini, Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki tiga BUMD, yakni PDAM Tirta Kencana yang bergerak di bidang pengadaan air, Perusda Varia Niaga yang membidangi 22 jenis kegiatan usaha, dan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) yang menyediakan jasa keuangan. Keberadaan ketiga BUMD ini tentunya sejalan dengan misi kedua Kota Samarinda, yaitu mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan. Namun demikian, untuk mendorong kontribusi yang optimal terhadap pendapatan PAD, maka perlu dilakukan ekspansi usaha yang dilakukan BUMD sesuai dengan potensi daerah.

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, sangat penting bagi Kota Samarinda untuk terus menggali dan mengembangkan potensi ekonominya. Hal tersebut juga didasari oleh performa pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda, dimana pada tahun 2022 Kota Samarinda menempati urutan kedua laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur dan berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Posisi Kota Samarinda sebagai mitra IKN juga melatarbelakangi tingginya peluang Kota Samarinda untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah, khususnya melalui BUMD. Berangkat dari latar belakang tersebut, Pemerintah Kota Samarinda memandang perlu untuk melakukan sebuah kajian yang bertujuan untuk memetakan potensi ekonomi Kota Samarinda yang dapat dikelola oleh BUMD melalui kajian yang berjudul “Kajian Penyusunan Peta Potensi Ekonomi yang Dapat Dikelola BUMD Kota Samarinda”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian campuran (*mix-method*), dengan pendekatan deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan melakukan perhitungan *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Tipologi Klassen*. Adapun analisis kualitatif dilakukan melalui pendalaman wawancara (*indepth-interview*) serta penelusuran berbagai dokumen (*documentation study*) untuk memudahkan pemetaan potensi ekonomi di setiap kecamatan berdasarkan komoditas/ sub-sektor/ produk usaha turunan hasil dari perhitungan kuantitatif yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan

informan kunci antara lain 3 BUMD existing di Kota Samarinda, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan dunia usaha yang terhimpun dalam asosiasi (KADIN), serta perguruan tinggi di Kota Samarinda. Selain *indepth interview*, data primer kajian ini juga didapatkan dengan menyebarkan kuesioner untuk melihat persepsi pelaku usaha dan 16 OPD Kota Samarinda terhadap potensi pembentukan BUMD baru di Kota Samarinda. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, hasil penelitian, serta informasi lain yang terdapat di media sosial.

Dari perhitungan LQ, terlihat bahwa dari 21 sektor PDRB Kota Samarinda, 18 sektor yang masuk dalam kategori Basis dan 3 sektor masuk dalam sektor Non Basis. Sedangkan perhitungan tipologi Klassen menempatkan 11 sektor atau sebesar 52% dari seluruh sektor PDRB sebagai komoditas prima atau pada kuadran I. Dilihat secara spasial, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki ketersediaan lahan investasi terbesar dengan luasan 8.058,68 Ha atau 37,54% dari seluruh luasan lahan investasi di Kota Samarinda. Dari hasil wawancara, komoditas jagung memiliki potensi untuk dikembangkan khususnya untuk pakan ternak, komoditas aren sebagai alternatif gula, komoditas ternak unggas terutama ayam beku, dan komoditas perikanan tangkap dan budidaya khususnya ikan lele, nila, dan mas.

Di sektor koperasi, UKM, dan perindustrian, produk UKM akan didorong untuk diperkenalkan ke luar daerah dan diletakkan di pusat perbelanjaan dan hotel. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri, dilaksanakan beberapa kegiatan bimbingan teknis industri, antara lain fasilitasi industri berupa pendaftaran merk/HAKI, halal dan pembinaan terkait kesadaran wajib SNI, pameran promosi unggulan IKM dan workshop pelaku usaha. Selanjutnya sektor perdagangan sebagai salah satu sektor basis memiliki potensi ekonomi pasar rakyat sebanyak 12 pasar. Terdapat juga potensi ekonomi Bebaya Mart yang merupakan usaha retail yang dimiliki oleh Kota Samarinda dan dijalankan oleh Perumda Varia Niaga, dan telah dapat diakses dengan aplikasi. Ke depannya, Bebaya Mart akan dibangun di setiap RT, dan akan menjual kebutuhan masyarakat yang berada di setiap RT. Adapun pada sektor air, persentase rumah tangga dengan akses terhadap layanan air minum berkualitas (layak) telah mencapai 94,31%, dan angka ini cenderung meningkat setiap tahun (BPS Kaltim, 2023). Adapun jumlah pelanggan aktif PDAM hingga Desember 2022 tercatat sebanyak 163.617 pelanggan, serta telah menghasilkan laba yang meningkat dari Rp12 Miliar di tahun 2021 menjadi Rp43,1 Miliar di tahun 2022 dan secara signifikan menyumbang PAD untuk Kota Samarinda (hasil wawancara PDAM, 2023). Dengan semakin meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses air bersih di Kota Samarinda, membuka peluang pemanfaatan air untuk bisnis lainnya, misalnya layanan air bersih (baku) di kapal.

Terdapat 10 kecamatan di Kota Samarinda yang memiliki potensi ekonomi yang diolah oleh dari hasil wawancara dengan perangkat daerah, data BPS, dokumen RTRW Kota Samarinda, dokumen DPUPR Provinsi Kalimantan Timur, serta dokumen investasi DPMPTSP Kota Samarinda. Kecamatan Samarinda Utara memiliki sektor unggulan yaitu pertanian, pariwisata, dan real estate, Kecamatan Loa Janan Ilir memiliki potensi terbesar juga pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang didukung oleh luasan lahan sebesar 494,27 Ha atau 41,67% dari total seluruh sektor investasi yang ada. Selanjutnya Kecamatan Palaran didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, khususnya untuk pertambangan pasir sungai dan pertambangan batu bara. Kecamatan Samarinda Ilir memiliki potensi real estate dan masuk sebagai salah satu kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah dengan luas kapling 500 M2 per unit. Kecamatan Samarinda Kota didominasi oleh sektor perdagangan, misalnya terdapat pasar tradisional Pasar Pagi, Citra Niaga, dan sentra Pasar Burung. Salah satu potensi ekonomi di Kecamatan Samarinda Seberang adalah sektor industri misalnya industri pengolahan khususnya reparasi produk logam dan pabrikasi dan mesin peralatan. Adapun di Kecamatan Samarinda Ulu, potensi ekonomi berpusat di sektor perdagangan dan industri khususnya industri amplang. Adapun Kecamatan Sungai Kunjang memiliki potensi di sektor real estate dengan total luasan sebesar 797,56 Ha atau 48,40% dari total seluruh investasi. Kecamatan Sungai Pinang juga memiliki potensi real estate dan masuk dalam kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang. Terakhir di Kecamatan Sambutan memiliki potensi investasi terbesar pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu seluas 1.475,34 Ha atau 63,60% dari total luasan seluruh sektor investasi, khususnya berada di Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sindang Sari.

Berdasarkan karakteristik Kota Samarinda seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa potensi daerah yang berpeluang untuk dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berikut adalah beberapa potensi daerah di Kota Samarinda yang dapat dikelola oleh BUMD:

1. Pengelolaan Pasar Rakyat. Saat ini, pengelolaan pasar rakyat di Kota Samarinda berada dalam kewenangan Dinas Perdagangan Kota Samarinda melalui UPTD Pasar Pagi dan UPTD Pasar Segiri. Secara teknis, kedua UPTD tersebut membawahi 12 pasar rakyat lainnya. Dengan pengelolaan pasar melalui BUMD, diharapkan pasar rakyat di Kota Samarinda dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang modern dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kota Samarinda.
2. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU). Kota Samarinda memiliki potensi yang sangat besar pada sektor pemotongan hewan dan unggas, namun saat ini masih belum mencapai tingkat produktivitas yang optimal dalam operasionalnya.

Meskipun demikian, terdapat potensi yang signifikan dengan potensi penyembelihan minimal 40.000 ekor setiap harinya.

3. Industri pengolahan Jagung: Jagung merupakan salah satu produk hasil perkebunan yang memiliki dimensi penggunaan/pemanfaatan sangat luas, seperti untuk pakan ternak (langsung ataupun olahan), pangan pokok bagi penduduk, bahan baku industri dan lainnya. Sementara ini, di Provinsi Kalimantan Timur belum ada industri yang bergerak di sektor pengolahan jagung, terutama sebagai olahan bahan pakan ternak. Potensi ini didukung juga oleh produktivitas jagung sebesar 39 Kuintal/Ha, dengan luas panen 70.56 Ha di tahun 2022.
4. Pengelolaan Parkir. Kota Samarinda memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir yang sangat menjanjikan. Hal tersebut tergambar dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda, berdasarkan data Korlantas Polri (2023), jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda hingga 19 Juni 2023 adalah 946.475 unit kendaraan, menjadikannya yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pengembangan sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor basis dalam struktur PDRB Kota Samarinda. Secara keseluruhan, pengembangan sektor konstruksi di Kota Samarinda memiliki potensi yang menjanjikan, terutama dalam konteks pertumbuhan kota yang masif dan peran Kota Samarinda sebagai mitra Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.
6. Transportasi massal. Untuk mengurai permasalahan kemacetan di Kota Samarinda, perlu penyediaan transportasi publik yang memadai dan terintegrasi. Ke depan dengan perpindahan IKN yang kian dekat, upaya penyiapan berbagai moda transportasi massal juga perlu segera dimatangkan. Khususnya pada transportasi diatas rel seperti kereta api, MRT, serta LRT. BUMD Kota Samarinda dapat memainkan peran untuk penyiapan moda tersebut dengan dukungan investasi dari Pemerintah Kota Samarinda.
7. Pengembangan sektor industri olahan perikanan tangkap dan budidaya. Salah satu komoditas unggulan di Kota Samarinda adalah produksi ikan lele dan ikan nila, bahkan produksi ikan lele Kota Samarinda merupakan yang tertinggi di Provinsi Kaltim yaitu sekitar 600 ton/tahun. Melimpahnya hasil produksi ikan lele dan ikan nila di Kota Samarinda seharusnya diikuti oleh industri/usaha pengolahannya. Pengolahan ikan lele menjadi produk turunan seperti nugget misalnya, mampu meningkatkan nilai tambah dari tiap harga jualnya.
8. Pemasaran hasil UKM, beragamnya hasil produksi UKM di Kota Samarinda tentu membutuhkan lapak penjualan dan pemasaran. BUMD Varia Niaga saat ini memiliki unit bisnis berbentuk minimarket yang bernama Bebaya Mart yang direncanakan akan dibangun di setiap Kecamatan juga dapat membantu dalam distribusi bapokting secara cepat.

9. Pengelolaan sampah. Mekanisme pembuangan sampah di Kota Samarinda hanya berakhir di TPA, belum ada konsep untuk memanfaatkannya sebagai sumber energi. Contoh pengelolaan sampah yang dapat bernilai ekonomi adalah pengolahan sampah yang memanfaatkan tumpukan sampah menjadi gas metana. Melalui gas metana ini dapat membantu masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai pengganti Gas LPG, dan dapat digunakan untuk memasak.
10. Pengelolaan limbah dan daur ulang. Ini merupakan salah satu sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang kurang, tetapi memiliki kontribusi lebih besar terhadap PDRB Kota Samarinda. Melihat hal tersebut, maka terdapat sebuah peluang untuk mengelola sektor layanan pengelolaan lumpur tangki septik (sedot tinja).
11. Pengelolaan air minum kemasan dan es kristal. Sektor air merupakan sektor basis di Kota Samarinda. Menindaklanjuti hal tersebut, maka terdapat peluang bisnis bagi BUMD untuk melakukan diversifikasi produk hasil olahan air menjadi sebuah produk air minum dalam kemasan (botol ataupun galon). Es kristal juga berpotensi di kelola oleh BUMD Tirta Kencana Kota Samarinda, mengingat masifnya pertumbuhan cafe dan restoran.
12. Sektor periklanan luar ruangan (reklame, videotron, megatron). Periklanan luar ruangan ini masih cukup potensial disamping periklanan digital yang saat ini juga cukup marak digunakan. Untuk itu, penambahan sarana periklanan di beberapa titik/ kawasan di Kota Samarinda dapat dilakukan untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas.
13. Sektor Keuangan. Dalam rangka penguatan literasi dan inklusi keuangan untuk siswa-siswa di Kota Samarinda, BUMD (BPR) yang bergerak di sektor keuangan dapat mengembangkan program tabungan khusus untuk pelajar.
14. Pengembangan sektor pariwisata melalui penyediaan paket wisata (*travel tour*) wilayah Kota Samarinda. Potensi wisatawan diproyeksikan juga akan cukup meningkat ditengah keberadaan IKN nantinya sehingga mendorong peluang besar bagi BUMD untuk dapat mempersiapkan paket-paket wisata dengan dukungan dari instansi terkait.

Untuk mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Samarinda, maka diperlukan langkah-langkah penguatan ke depan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda, yaitu:

1. **Optimalisasi bidang usaha BUMD yang dikelola melalui anak perusahaan (*subsidiary companies*) atau mendelegasikan pada divisi baru di BUMD.**

Dengan berbagai potensi ekonomi yang berpeluang dikelola oleh BUMD, maka pembentukan anak perusahaan atau divisi khusus dalam pengelolaan BUMD menjadi pilihan terbaik dibandingkan membentuk BUMD baru. Skema ini tentu membutuhkan dukungan tambahan sumberdaya professional dan kompeten namun tetap dalam kontrol dan

pengawasan BUMD induk sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja BUMD dan menciptakan nilai pasar perusahaan.

2. Koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk menciptakan peluang bagi pengembangan BUMD.

Dalam pelaksanaannya, BUMD dapat berkolaborasi dengan semua pihak. BUMD dapat berkolaborasi dengan BUMD lainnya, misalnya antara PDAM dengan Varian Niaga, serta BPR. Kolaborasi dengan BUMD lain di daerah (kabupaten/kota lainnya), seperti yang telah dilakukan Varia Niaga dengan BUMD Pinrang. Kolaborasi dengan swasta (b to b) misal PDAM dengan swasta dalam penyediaan air bersih bagi kapal bongkar muat dan lainnya, juga BUMD dengan masyarakat, termasuk dengan BUMKel dan BUMRT, dengan pengembangan Bebaya Mart. Juga kolaborasi BUMD dengan BUMN (misalnya kewenangan di pusat, sehingga membuat "usaha patungan", atau dengan pembagian BUMN untuk produksi dan pemasaran, sedangkan BUMD untuk pengelolaan operasional, perijinan dan SDM).

3. Pemanfaatan potensi Ekonomi daerah dengan memperhitungkan pihak swasta yang mengelola sektor tersebut, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Kota Samarinda.

Sektor konstruksi menjadi sektor basis dan unggulan di Samarinda, dan prospek dengan hadirnya IKN diharapkan akan terus berkembang, namun dibutuhkan sumber daya cukup besar, disamping faktor lainnya. BUMD dapat mengambil peran di sektor jasa pendukung, atau juga berkolaborasi baik dengan BUMN atau swasta untuk berbisnis di sektor ini. Sektor perdagangan juga merupakan unggulan, bahkan menjadi jargon Kota Samarinda sebagai kota perdagangan dan jasa. Di Sektor perdagangan, saat ini Varian Niaga diberi kepercayaan Pemerintah Kota menjalankan Bebaya Mart yang berfokus pada distribusi dan perluasan usaha pangan serta berperan aktif dalam menjaga kestabilan pangan di Kota Samarinda.

4. Penguatan pengelolaan dan kapasitas SDM BUMD yang profesional serta manajemen yang berkualitas dan transparan.

Tidak seperti perusahaan swasta, BUMD tentunya mendapatkan kemudahan-kemudahan fasilitas, termasuk permodalan, perijinan, dan diawasi oleh orang-orang berkualitas (kompeten) sehingga diharapkan mampu bersaing. Komitmen pimpinan daerah untuk menghadirkan direksi yang kompeten dan profesional sehingga BUMD mampu memberikan pelayanan publik yang prima, juga mendapatkan laba (menggaet bisnis yang menguntungkan) serta operasionalnya yang 'sehat'. BUMD sehat dan berjalan baik, harus

dikelola dengan baik, dengan *marketing* yang baik, dan bisa mendatangkan investasi yang baik.

5. BUMD perlu melakukan inovasi-inovasi agar usahanya dapat berkembang baik dan memberikan pendapatan yang optimal.

Inovasi menjadi kunci sukses BUMD dalam melaksanakan fungsinya. Beberapa terobosan pengembangan dan pengelolaan sektor usaha perlu dilakukan agar dapat kompetitif dan bersaing dengan perusahaan swasta lainnya. BUMD kota samarinda perlu melakukan kolaborasi ditengah keterbatasan anggaran, SDM, serta dalam rangka perluasan pangsa pasar. BUMD juga perlu melakukan program inovatif yang mendukung pengembangan UKM. Rencana adanya BUMKel, selain BUMD Varian Niaga, BUMD BPR (Bank Perkreditan Rakyat) juga dapat ikut berperan disini. Jika dimungkinkan, program-program ProBebaya di RT (khususnya infrastruktur), agar pelaksanaan di lapangan sesuai perencanaan RT, dimungkinkan adanya kredit infrastruktur dari BUMD BPR yang memberi manfaat bagi RT/Kelurahan untuk menyelesaikan pembangunan secara tepat waktu.

BUMD PDAM Tirta Kencana yang mengelola hajat hidup masyarakat Samarinda, perlu terus mendengarkan dan merespons keluhan, melakukan perbaikan layanan, perluas cakupan layanan serta penguatan dan perbaikan infrastruktur (khususnya distribusi air bersih), bahkan menjadi benar-benar air layak minum. BUMD juga harus memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat dan dunia usaha di Kota Samarinda serta mampu menjadi perusahaan yang dapat bersaing dengan perusahaan swasta. Perkembangan teknologi saat ini juga menuntut kemampuan adaptasi yang cepat oleh BUMD Kota Samarinda. Penggunaan teknologi dalam proses bisnis BUMD akan memudahkan konsumen serta dalam rangka mempercepat proses produksi maupun penyediaan jasa yang diperlukan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Executive Summary	ii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Metode.....	5
E. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan	7
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP	8
A. Tinjauan Teoritis	8
- Teori Pertumbuhan Ekonomi	8
- Konsep Potensi Ekonomi Daerah	9
- Konsep Sektor Unggulan	9
- Pembangunan Ekonomi	10
- Konsep Badan Usaha Milik Daerah	11
B. Tinjauan Empiris	12
- Peran BUMD dalam Mengelola Potensi Daerah	12
C. Tinjauan Regulasi.....	14
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	14
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	16
BAB III HASIL DAN ANALISIS	19
A. Potensi dan Peluang Ekonomi Kota Samarinda	19
B. Sektor usaha yang berpotensi dikelola BUMD Kota Samarinda	43
C. Strategi Penguatan BUMD	51

BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Rekomendasi.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Distribusi Persentase PDRB Kota Samarinda Tahun 2018-2022	2
Tabel 1.2. Kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Samarinda Tahun 2018-2022	4
Tabel 3.1. Perhitungan LQ Kota Samarinda Tahun 2018-2022	20
Tabel 3.2. Matriks Tipologi Klassen di Kota Samarinda	22
Tabel 3.3. Data luasan dan persentase sektor investasi ruang Kota Samarinda	23
Tabel 3.4. Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kota Samarinda	24
Tabel 3.5. Data Populasi Ternak dan Produksi Daging di Kota Samarinda Tahun 2020-2022	25
Tabel 3.6. Jumlah pedagang yang memiliki SKTUB	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kawasan Strategis Kota Samarinda	3
Gambar 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda Tahun 2018-2022	4
Gambar 3.1. Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA Kota Samarinda Tahun 2020-2022	19
Gambar 3.2. Nilai Location Quotient (LQ) Tertinggi ke Terendah	21
Gambar 3.3. Produk Unggulan Industri Kota Samarinda Berdasarkan Kecamatan	27
Gambar 3.4. Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Seluruh UKM Kota Samarinda Tahun 2016-2020	28
Gambar 3.5. Bebaya Mart dan Aplikasi Bebaya Mart	30
Gambar 3.6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Penyedia Air dari Air PDAM dan Air Tanah Tahun 2020	32
Gambar 3.7. Sektor potensi di Kecamatan Samarinda Utara	33
Gambar 3.8. Sektor potensi di Kecamatan Loa Janan Ilir	34
Gambar 3.9. Sektor potensi di Kecamatan Palaran	35
Gambar 3.10. Sektor potensi di Kecamatan Samarinda Ilir	36
Gambar 3.11. Sektor potensi di Kecamatan Samarinda Kota	37
Gambar 3.12. Sektor potensi di Kecamatan Samarinda Seberang	38
Gambar 3.13. Sektor potensi di Kecamatan Samarinda Ulu	39
Gambar 3.14. Sektor potensi di Kecamatan Sungai Kunjang	40
Gambar 3.15. Sektor potensi di Kecamatan Sungai Pinang	41
Gambar 3.16. Sektor potensi di Kecamatan Sambutan	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi membawa pengaruh pada kewenangan daerah untuk menggali potensi ekonomi di wilayahnya dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini juga dilakukan untuk menghadapi kondisi perekonomian global yang makin terbuka, sehingga diperlukan pengembangan wilayah berbasis ekonomi (Astuti, 2017). Adapun upaya pemerintah daerah untuk mengelola potensi-potensi daerah serta mendorong pembangunan daerah salah satunya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dua tujuan pendirian BUMD. Pertama, untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. Kedua, untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Kedua tujuan tersebut tentunya memberikan peran yang sangat penting bagi BUMD. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dimana dalam mendorong pembangunan daerah BUMD memiliki peran sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar serta turut membantu dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Bahkan BUMD tertentu juga berperan dalam meningkatkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan asli daerah (PAD) baik dalam bentuk pajak, deviden maupun hasil privatisasi (Umar, 2020).

Menurut PP Nomor 54 Tahun 2017, BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Oleh karenanya BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah; (2) badan usaha dimiliki oleh satu pemerintah daerah; lebih dari satu pemerintah daerah; satu pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah; (3) seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) bukan merupakan organisasi perangkat daerah; (5) dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha; dan (6) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Saat-ini, Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki tiga BUMD, yakni PDAM Tirta Kencana yang bergerak di bidang pengadaan air, Perusda Varia Niaga yang membidangi 22 jenis kegiatan usaha, dan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) yang menyediakan jasa keuangan. Keberadaan ketiga BUMD ini tentunya sejalan dengan misi kedua Kota Samarinda, yaitu mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan. Namun demikian, untuk mendorong kontribusi yang optimal terhadap pendapatan PAD, maka perlu dilakukan ekspansi usaha yang dilakukan BUMD sesuai dengan potensi daerah (Walikota Samarinda, 2022)¹

Dalam beberapa tahun terakhir perekonomian Kota Samarinda didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor konstruksi, perdagangan, dan pertambangan. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan tren antara tahun 2018-2020 namun kembali meningkat di tahun 2021-2022. Adapun sektor konstruksi dan perdagangan menunjukkan tren peningkatan, walaupun cenderung fluktuatif. Hal ini semakin menguatkan peran Kota Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan (RPJMD Kota Samarinda, 2021). Selain itu, dari tabel 1.1 juga terlihat bahwa baru 3 dari 17 sektor PDRB yang telah dikelola oleh BUMD, yaitu sektor pengadaan air, sektor perdagangan, dan sektor jasa keuangan. Artinya, masih terdapat 82,4% potensi sektor ekonomi yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh BUMD.

Tabel 1.1. Distribusi Persentase PDRB Kota Samarinda Tahun 2018-2022

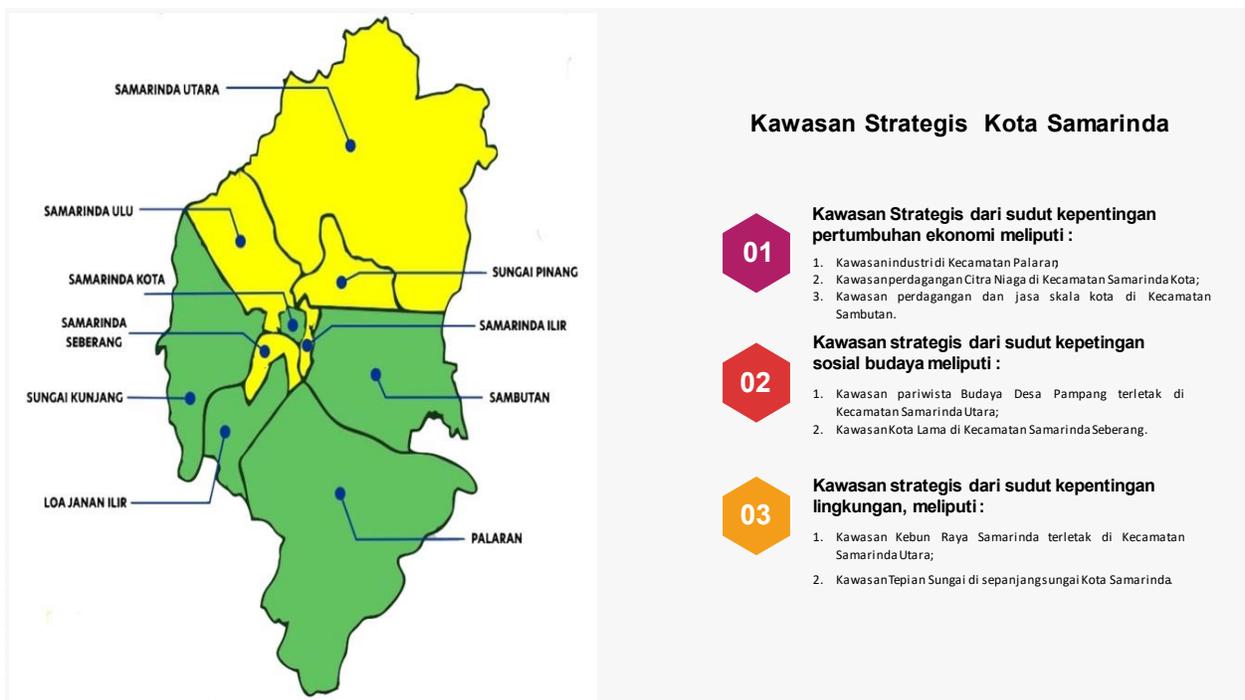
Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,82	1,75	1,83	1,74	1,55
B	Pertambangan dan Penggalian	13,48	12,71	10,98	12,51	15,66
C	Industri Pengolahan	7,87	7,72	7,72	7,47	6,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,17	0,16	0,14
E	Pengadaan Air; Pengelolaah Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,16	0,17	0,15
F	Konstruksi	21,05	21,61	20,98	20,76	20,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,03	16,32	17,12	16,62	16,07
H	Transportasi dan Pergudangan	6,91	7,20	7,28	7,40	7,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,95	4,08	4,04	3,92	3,79
J	Informasi dan Komunikasi	3,34	3,34	3,68	3,78	3,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,16	7,00	7,32	7,32	7,54
L	Real Estat	2,43	2,38	2,48	2,28	2,03

¹ <https://kalimantan.bisnis.com/read/20220804/407/1562862/wali-kota-samarinda-minta-bumd-perbaiki-kinerja>

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
M,N	Jasa Perusahaan	0,85	0,81	0,80	0,76	0,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,43	6,32	6,27	6,08	5,67
P	Jasa Pendidikan	4,07	4,11	4,53	4,34	3,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,40	1,41	1,71	1,87	1,71
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,92	2,97	2,94	2,84	2,71

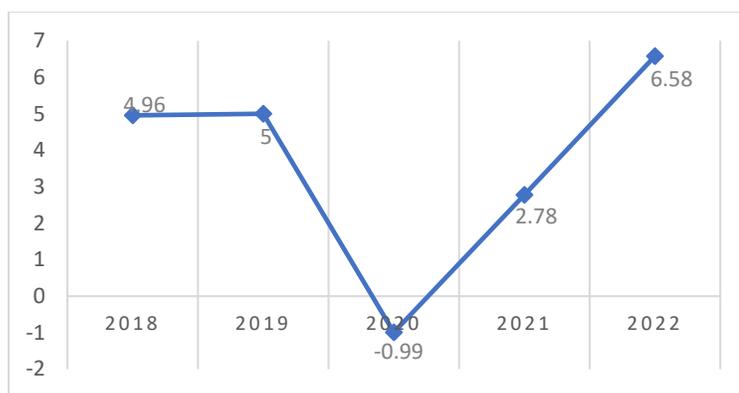
Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023

Selain berkaca dari PDRB, potensi ekonomi Kota Samarinda salah satunya dapat dilihat dari hasil kajian Puslatbang KDOD tahun 2021 tentang penguatan daerah penyangga dalam mendukung ibu kota negara yang menyebutkan bahwa terdapat tiga potensi unggulan Kota Samarinda, yaitu sektor perindustrian, pariwisata, dan perdagangan (LAN, 2021). Lebih lanjut, pengelolaan potensi sektor ekonomi tentunya juga perlu memperhatikan kebijakan Kawasan Strategis Kota Samarinda sebagaimana yang telah disebutkan dalam dokumen Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda tahun 2014-2034 (gambar 1.1).



Gambar 1.1. Kawasan Strategis Kota Samarinda

Selanjutnya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, sangat penting bagi Kota Samarinda untuk terus menggali dan mengembangkan potensi ekonominya (Mahakam, 2015). Hal tersebut juga didasari oleh performa pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda, dimana pada tahun 2022 Kota Samarinda menempati urutan kedua laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur dan berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Posisi Kota Samarinda sebagai mitra IKN juga melatarbelakangi tingginya peluang Kota Samarinda untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah, khususnya melalui BUMD.



Gambar 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda (BPS, 2023)

Dilihat dari nilai kontribusinya terhadap PAD Kota Samarinda, sumbangan ketiga BUMD terlihat masih belum optimal. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi PAD dari BUMD dan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp8,39 M. Adapun nilai kontribusi penerimaan BUMD terhadap PAD Kota Samarinda selama periode tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Meskipun nilai realisasi BUMD tahun 2022 lebih tinggi daripada tahun 2021, namun persentasenya masih di bawah capaian tahun 2021 (tabel 1.2).

Tabel 1.2. Kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi BUMD (dalam miliar rupiah)	Realisasi PAD (dalam miliar rupiah)	Persentase
2018	11,71	498,89	2,35%
2019	12,48	560,45	2,23%
2020	8,01	485,19	1,65%
2021	4,45	594,62	0,75%
2022	5,33	847,54	0,63%

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023; jpk.kemenkeu.go.id, 2023; data diolah

Berangkat dari latar belakang tersebut, Pemerintah Kota Samarinda memandang perlu untuk melakukan sebuah kajian yang bertujuan untuk memetakan potensi ekonomi Kota Samarinda yang dapat dikelola oleh BUMD melalui kajian yang berjudul “Kajian Penyusunan Peta Potensi Ekonomi yang Dapat Dikelola BUMD Kota Samarinda”.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengkajian ini adalah (1) mengidentifikasi potensi dan peluang ekonomi yang berpotensi dikelola oleh BUMD Kota Samarinda; serta (2) merumuskan alternatif kebijakan penguatan peran BUMD Kota Samarinda dalam pembangunan Kota Samarinda.

Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan kajian ini adalah tersusunnya peta potensi ekonomi Kota Samarinda dan peluang ekonomi yang dapat dikelola BUMD Kota Samarinda, serta tersusunnya strategi kebijakan penguatan peran BUMD Kota Samarinda

C. Ruang Lingkup

Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Ekonomi yang dapat Dikelola BUMD Kota Samarinda ini akan menghasilkan Peta Potensi Ekonomi berbasis Kecamatan yang diurai dari prioritas sektor berdasarkan potensi ekonomi daerah terbaik untuk dikembangkan oleh BUMD Kota Samarinda. Dengan demikian, kajian ini membatasi pada potensi ekonomi daerah yang dimiliki oleh Kota Samarinda yang berpotensi secara ekonomi untuk dikelola oleh BUMD Kota Samarinda.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian campuran (*mix-method*), dengan pendekatan deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan melakukan perhitungan *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Tipologi Klassen*. Adapun analisis kualitatif dilakukan melalui pendalaman wawancara (*indepth-interview*) serta penelusuran berbagai dokumen (*documentation study*) untuk memudahkan pemetaan potensi ekonomi di setiap kecamatan berdasarkan komoditas/ sub-sektor/ produk usaha turunan hasil dari perhitungan kuantitatif yang dilakukan sebelumnya.

Untuk menghitung sektor basis dan non-basis di suatu daerah, salah satu alat analisis yang digunakan adalah *Location Quotient* (LQ), dengan membandingkan kontribusi sektor terhadap output bruto suatu daerah dengan kontribusi sektor tersebut terhadap nilai output bruto provinsi (Hidayah, Khoirudin, dan Nasir, 2023). Perhitungan *Location Quotient* dapat digambarkan dengan rumus berikut:

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Keterangan:

LQ = Nilai Location Quotient

Si = PDRB Sektor i di Kota Samarinda

S = PDRB total di Kota Samarinda

Ni = PDRB Sektor i di Provinsi Kalimantan Timur

S = PDRB total di Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat tiga kemungkinan nilai LQ yang ditemukan, yaitu $LQ = 1$; $LQ > 1$; dan $LQ < 1$. Apabila nilai $LQ > 1$ maka tergolong sektor **basis** dan sebaliknya bila nilai $LQ < 1$ atau $LQ = 1$ tergolong sektor **non basis**.

Selain perhitungan *Location Quotient* (LQ), dilakukan juga analisis tipologi Klassen yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan pola pertumbuhan ekonomi setiap daerah, dan menggambarkan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah (Iskandar dan Saragih, 2018). Perhitungan ini akan menghasilkan empat klasifikasi/ kuadran, yaitu:

1. Kuadran I Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, merupakan wilayah yang mengalami tingkat pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita lebih tinggi dari rata-rata seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kuadran II Daerah maju tapi tertekan, merupakan wilayah yang relatif maju karena PDRB per kapita daerah lebih tinggi dari seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir tingkat pertumbuhan PDRB daerah menurun, lebih rendah dibanding rata-rata seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kuadran III Daerah berkembang cepat, merupakan wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB daerah tinggi, namun PDRB per kapita daerahnya relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kuadran IV Daerah relatif tertinggal, merupakan wilayah yang mempunyai tingkat pertumbuhan PDRB daerah yang berada di bawah rata-rata dari seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini masih relatif rendah. (Iskandar dan Saragih, 2018)

Adapun pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci antara lain 3 BUMD existing di Kota Samarinda, perangkat daerah terkait, perwakilan dunia usaha yang terhimpun dalam asosiasi, serta perguruan tinggi di Kota Samarinda. Selain *indepth interview*, data primer kajian ini juga didapatkan dengan menyebarkan kuesioner untuk melihat persepsi pelaku usaha dan 16 Perangkat Daerah Kota Samarinda terhadap potensi ekonomi yang dapat dikelola BUMD di Kota Samarinda. Adapun pelaku usaha yang menjadi responden adalah KADIN, Dekranasda, dan HIPMI Kota Samarinda, sedangkan 16 Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda yang dijadikan responden sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Sekretariat Daerah | 9. Dinas Koperasi, UMK dan Perindustrian |
| 2. Dinas Kesehatan | 10. Dinas Perdagangan |
| 3. Dinas PUPR | 11. DPMPTSP |
| 4. Dinas Perkim | 12. Dinas Perikanan |
| 5. Disnaker | 13. Dinas Pariwisata |
| 6. Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian | 14. BPKAD |
| 7. DLH | 15. Kecamatan |
| 8. Diskominfo | 16. Dinas Perhubungan |

Sedangkan data sekunder didapatkan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang bersumber dari buku, jurnal, hasil penelitian, serta informasi lain yang relevan dan terkait dengan kajian ini.

E. Waktu dan Pelaksanaan Penelitian

Kajian Penyusunan Peta Potensi Ekonomi yang dapat Dikelola BUMD Kota Samarinda ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan. Di mulai pada bulan Maret 2023 hingga tahapan penyelesaian pada bulan Juni 2023.

No	Kegiatan	Estimasi Waktu Pelaksanaan (Bulan)			
		Maret	April	Mei	Juni
1	Penyusunan Rancangan Penelitian (<i>Research Design</i>) dan Instrumen Survey				
2	Pengumpulan Data Lapangan				
3	Pengolahan dan Analisis Data				
4	Penyusunan <i>Draft</i> Laporan				
5	Ekspose Hasil				

BAB II

TINJAUAN TEORITIS, EMPIRIS, DAN KEBIJAKAN

A. Tinjauan Teoritis

- Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi di suatu negara (Azwina, dkk, 2023). Adapun pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dimaknai sebagai peningkatan pendapatan masyarakat karena adanya kenaikan dari seluruh nilai tambah secara keseluruhan yang terjadi di suatu wilayah (Tarigan, 2005). Sedangkan Harrod-Domard (Mankiw dalam Hamzah dkk, 2023) memandang perekonomian dapat tumbuh dalam jangka panjang dan stabil jika perekonomian berada dalam kondisi padat pekerja dan penggunaan penuh barang modal masyarakat.

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Simon Kuznets (1955), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang suatu negara dalam pemenuhan beragam barang ekonomi bagi masyarakatnya. Kuznets menemukan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perbedaan pendapat berupa kurva berbentuk “U-terbalik”, yang ditandai pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun selanjutnya distribusi pendapatannya membaik (Yuliani, 2015).

Teori lain terkait pertumbuhan ekonomi dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu penduduk, tenaga kerja, modal dan tingkat teknologi yang digunakan (Tarigan dalam Kuranto dan Arif, 2023). Teori ini memiliki beberapa kelebihan antara lain perekonomian akan menuju ke posisi keseimbangan jangka panjang, dapat leluasa digunakan untuk menjelaskan permasalahan distribusi pendapatan, serta mampu menjelaskan faktor kemajuan teknologi di dalamnya (Amalia dkk, 2016).

Sejalan dengan pendapat Solow-Swan, Todaro (dalam Yuliani, 2015) menyatakan terdapat tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi di setiap negara yaitu: (1) Akumulasi modal yang meliputi seluruh jenis investasi baru yang ditanamkan, yang akan berdampak positif pada angka produksi atau memperbesar pendapatan di masa depan. (2) Pertumbuhan penduduk, yang diiringi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan jumlah produktivitas, namun dapat menjadi positif atau negatif tergantung pada kemampuan ekonomi dalam menyerap angkatan kerja. (3) Kemajuan teknologi, terlihat dari ditemukannya cara-cara atau teknologi baru yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi berkembang lebih cepat.

Glasson (dalam Ghalib, 2005) menyebut lima strata ekonomi pembentuk pembangunan wilayah. *Peringkat pertama*, disebut strata ekonomi subsistence, dimana keluarga-keluarga memproduksi cukup bagi kehidupannya sendiri, serta memiliki investasi dan perdagangan skala kecil dengan mayoritas bekerja pada sektor pertanian. *Peringkat kedua*, dimana sektor transportasi telah berkembang, khususnya perdagangan dan spesialisasi produksi yang merupakan pengembangan dari strata satu. *Peringkat ketiga*, dengan meningkatnya perdagangan, diikuti pula oleh meningkatnya permintaan dan produksi sektor pertanian. *Peringkat keempat*, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan menurunnya pengembalian sektor pertanian, daerah terpaksa mengalihkan harapan pada sektor perindustrian. *Peringkat terakhir*, perekonomian melakukan pengembangan industri tahap ketiga, yaitu industri yang menghasilkan barang-barang dengan tujuan ekspor.

- Konsep Potensi Ekonomi Daerah

Dalam pembangunan wilayah, diperlukan pemanfaatan sektor potensial dan sektor unggulan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Potensi ekonomi adalah segala sesuatu yang dimiliki daerah yang mungkin atau layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko dalam Hastin, 2021). Daerah pengembangan potensi sektor ekonomi tersebut diharapkan pula akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan sumberdaya daerah sekitar dan bagi daerah pengembangan sektor ekonomi unggulan sendiri akan meningkatkan ekspor produk dan jasa yang dihasilkan (Ibrahim, 2018).

- Konsep Sektor Unggulan

Sektor/ sub sektor unggulan merupakan sektor/ sub sektor yang memiliki laju pertumbuhan lebih cepat dan memiliki kontribusi yang relatif besar dibandingkan dengan sektor yang sama (Widodo, 2006). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001).

Ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu:

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Dalam lingkungan daerah dalam suatu negara, suatu komoditi dikatakan mempunyai daya saing apabila komoditi tersebut tidak hanya laku dijual di pasar lokal di daerahnya sendiri, melainkan juga dapat bersaing di luar daerahnya. Sektor atau subsektor yang mempunyai karakteristik demikian dinamakan sebagai sektor atau subsektor basis.

Sjafrizal (2008: 87), model basis mula-mula diperkenalkan oleh Douglas C. North. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Bila daerah yang bersangkutan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan komparatif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah yang bersangkutan akan ditingkatkan. Proses produksi atau pertumbuhan industri-industri di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku dan outputnya diekspor, akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi atau kekayaan daerah, peningkatan pendapatan perkapita dan penciptaan peluang kerja (*job creation*) di daerah tersebut. Kegiatan basis ekonomi mempunyai peranan sebagai penggerak pertama (*primer mover rule*), sedangkan setiap perubahan mempunyai "efek multiplier" terhadap perekonomian regional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui sektor basis dan bukan basis antara lain menggunakan metode analisis "location quotient" (LQ).

Pemetaan sektor basis perlu dilakukan dalam menunjang pembangunan ekonomi suatu daerah. Dengan pemetaan sektor basis maka akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam pembangunan ekonomi (Widyaningrum dan Cahyono, 2021).

- Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah menurut Lincoln Arsyad (2005), adalah suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang ada dalam pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) wilayah tersebut. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Jika akan membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan.

Pembangunan daerah pada umumnya diarahkan kepada pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan peningkatan barang dan jasa yang diukur dengan besaran yang dikenal dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada hakekatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan hanya sebagai sarana dalam meraih kesejahteraan, tetapi lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator pengukur keberhasilan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu diingat bahwa ukuran

keberhasilan pembangunan suatu daerah juga ditentukan dari kemampuan daerah tersebut dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga di dalamnya kemampuan menekan kesenjangan antar golongan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bahwa semua orang akan memperoleh manfaat yang sama, karenanya pemerataan (pengurangan kesenjangan), pengurangan pengangguran dan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah.

- Konsep Badan Usaha Milik Daerah

BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Hal ini tercantum dalam UU No 23 tahun 2014. Dalam pengelolaan BUMD, peran kepala daerah sangat berperan, hal ini dikarenakan perannya selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan kepala daerah

Sesuai PP 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perumda merupakan BUMD dimana keseluruhan modalnya dimiliki oleh satu daerah saja dan tidak berbentuk saham. Perseroda merupakan BUMD dimana modalnya terbagi dalam bentuk saham dimiliki oleh beberapa daerah. Sesuai dengan kewenangannya, setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya.

Salah satu dasar pendirian BUMD adalah adanya kebutuhan daerah. Selain untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi, serta perolehan laba, dukungan BUMD untuk penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. Oleh M Natzir Said (dalam Raynita, 2022), dikatakan BUMD disatu sisi bersifat komersil (*Commercial Corporation*) dan disisi lain bersifat sosial (*Social Service Corporation*). Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Sementara tujuan khusus Perseroda bertujuan memupuk keuntungan sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah pada umumnya.

Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 156, BUMD (melalui penyertaan modal pemerintah) juga mendapat penugasan dari pemerintah/ Pemerintah daerah untuk

membayai program/ kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Jika melihat tujuan pembentukannya, keberadaan BUMD sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdirinya BUMD di suatu daerah diharapkan dapat memberikan pengaruh (*multiplier effect*) yang besar bagi perekonomian masyarakat, karena BUMD dapat beroperasi dengan efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dapat menyediakan produk-produk vital yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi rakyat. Keinginan pemerintah daerah di era otonomi untuk mendirikan BUMD dalam mengelola potensi daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan diharapkan dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah.

B. Tinjauan Empiris

- Peran BUMD dalam Mengelola Potensi Daerah

Hasil penelitian Alhusain (2010) menyimpulkan bahwa masih banyak sektor potensi ekonomi yang belum dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sektor usaha pada bidang keuangan yang saat ini dikelola oleh Perusahaan Daerah/BUMD di ketiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, NTB, dan Kalsel sudah berjalan dengan baik dan dapat menyumbangkan pendapatan bagi daerah. Namun demikian, untuk sektor usaha lain yang ditangani Perusahaan Daerah/BUMD masih belum seluruhnya optimal dalam pengelolaannya. Kendala utamanya adalah masalah manajerial, SDM serta ketentuan lain yang menyebabkan Perusahaan Daerah/ BUMD sulit untuk melakukan ekspansi usaha. Kajian lainnya terkait tinjauan aspek ekonomi kegiatan pembentukan atau pembentukan BUMD Perusahaan Umum Daerah Pariwisata Kabupaten Magetan, layak untuk dilakukan karena sangat bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Magetan. Keuntungan yang diterima dari aspek ekonomi yaitu peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan komponen PAD lainnya (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, retribusi parkir, retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan, dan lain sebagainya), serta hasil sewa lahan dan bangunan bagi para pelaku usaha pengguna jasa pariwisata (Juwita, Prasetyani dan Sari, 2021).

Marliza, dkk (2021) menemukan bahwa terdapat beberapa potensi yang dapat dikelola oleh BUMD Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dari sisi potensi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara diketahui bahwa sektor utama adalah: Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki potensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan dalam pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun strategi pengelolaan BUMD perseroan (perseroda) dapat menggunakan konsep perusahaan pengendali atau membentuk perusahaan kelompok/grup (*holding*

company), dengan grup usaha horizontal, karena bergerak di berbagai bidang aneka usaha yang tidak berkaitan. Dalam dokumen Naskah Akademik Pendirian BUMD Aneka Usaha Kabupaten Kebumen (2021) diketahui bahwa beberapa sumber potensial yang secara faktual dapat memberikan pemasukan bagi daerah dan merupakan peluang usaha yang cukup potensial untuk menaikkan kontribusi laba perusahaan daerah terhadap PAD di Kabupaten Kebumen.

Beberapa divisi unit usaha dalam pengelolaan BUMD Aneka Usaha sebagai *holding company* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan, divisi ini menjalankan usaha sebagai distributor maupun penjualan langsung komoditas unggulan seperti garam dan gula semut. Selain itu juga menyediakan saprotan pupuk baik yang bersubsidi maupun non subsidi;
- b. Jasa Wisata, dengan dibentuknya jasa wisata (*travel agent*) yang menyediakan pelayanan wisata ataupun MICE untuk keperluan perorangan, grup maupun perusahaan/dinas dengan tujuan akomodasi dan obyek/tujuan wisata yang bervariasi;
- c. Industri pengolah gula semut, adapun yang akan dikerjakan oleh BUMD Aneka usaha adalah gula semut organik, yaitu dengan mengolah kembali gula semut yang dihasilkan dari sekitar 300 petani agar sesuai dengan standar kebutuhan ekspor gula semut, baik ukuran, warna, kekeringan sampai dengan pengemasan;
- d. pergudangan (*cold storage*), dibentuk untuk pengembangan usaha perikanan dengan pembangunan *cold storage*, sebagai tahapan pengawetan sifat-sifat alami produk hasil perikanan.

Selain memberikan rekomendasi potensi usaha, Naskah Akademik ini juga menganalisis keuangan (kelayakan Usaha) BUMD Aneka Usaha dengan memperhatikan aspek proyeksi aliran kas serta hasil analisis manfaat atas biaya investasi (perhitungan *net present value*, perhitungan *profitability index*, perhitungan *payback period*, serta perhitungan *internal rate of return*).

Terdapat banyak hasil penelitian yang menggambarkan kontribusi BUMD dalam mengelola potensi daerah, khususnya pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nurmiati dkk (2019) dalam kajiannya menemukan bahwa di Kota Makassar, pertumbuhan penerimaan BUMD pada kurun waktu 2014-2018 rata-rata sebesar 110,68%, namun kontribusi BUMD terhadap PAD masih masuk dalam kriteria sangat kurang (rata-rata 1,73%) meskipun persentasenya terus meningkat. Senada dengan hal tersebut, BUMD di Kabupaten Bandung juga menunjukkan tingkat efektifitas penerimaan BUMD rata-rata sebesar 102,89%, namun kontribusi pada PAD rata-rata sebesar 0,63% atau sangat kurang (Dewi, 2022). Kontribusi pada PAD yang diperoleh PT. Air Bersih (PTAB) Jawa Timur terus mengalami peningkatan penghasilan, dari 1.992 Miliar di tahun 2014 melonjak menjadi 2.346 Miliar pada tahun 2019 (Wijoyo dan Mashuri, 2021).

Dari 5 BUMD yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara, 4 BUMD memperoleh laba sepanjang tahun 2021, dan 1 BUMD mengalami kerugian. Adapun jumlah PAD meningkat dari Rp 5.967,65 Miliar di tahun 2020 menjadi 5.991,15 Miliar di tahun 2021 (Safira dan Yafiz, 2022). Berbanding terbalik, hasil penelitian Haryanto dkk (2022) menemukan bahwa kontribusi BUMD Kota Bekasi terhadap PAD Kota Bekasi sangat kecil, yaitu hanya 1,5%, bahkan dari 6 BUMD yang dimiliki, 2 BUMD tidak dapat memberikan laba sama sekali.

C. Tinjauan Regulasi

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pergeseran paradigma penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi sebagai salah satu tuntutan reformasi memberikan harapan maupun tantangan bagi Pemerintah Daerah. Pasca reformasi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik ataupun peningkatan daya saing daerah. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berusaha diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, yang sekaligus mempertegas pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah adalah tiap-tiap daerah otonom diarahkan untuk mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung lagi kepada pemerintah pusat. Ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, bahwa daerah dituntut untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut salah satunya yaitu dengan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah, kondisi sosial budaya, kearifan lokal, karakteristik dan prioritas baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam daerah. Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan antar daerah tentu akan berbeda satu sama lain.

Salah satu bentuk aktualisasi dalam upaya meningkatkan kemampuan perekonomian daerah sebagai upaya menyejahterakan rakyat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini yaitu adanya kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan keuntungan melalui pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengaturan tentang BUMD semula mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang kini telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang secara lebih teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pendirian BUMD bagi daerah ditujukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Tujuan pendirian BUMD sebagaimana tertera dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bentuk hukum dari Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum daerah yang dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah. Organ perusahaan perusahaan umum daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.

Sedangkan perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Dalam hal pemegang saham, perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Begitu juga dengan organ perusahaan perseroan daerah yang terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah dan salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Bukan daerah dalam hal ini adalah unsur Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lainnya, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan perorangan.

Pembentukan BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang mendasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk kelayakan bidang

usaha dapat dikaji melalui analisis atas kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, disahkannya peraturan pemerintah ini adalah sebagai instrumen untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan undang-undang.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 meliputi kewenangan dan posisi kepala daerah terhadap BUMD. Dalam aturan tersebut, Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala daerah berwenang dalam menetapkan kebijakan BUMD seperti penyertaan modal, subsidi, penugasan, penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Lebih lanjut disebutkan bahwa, kedudukan Kepala Daerah dalam perusahaan umum daerah adalah sebagai pemilik modal, sedangkan dalam perusahaan perseroan daerah berkedudukan sebagai pemegang saham. Selain itu, Kepala Daerah juga berwenang dalam mengambil keputusan. Kewenangan pengambilan keputusan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut dapat berupa perubahan anggaran dasar; pengalihan aset tetap; kerja sama; investasi dan pembiayaan termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal, penyertaan modal pemerintah daerah yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas, komisaris, dan direksi; penghasilan dewan pengawas, komisaris dan direksi; penetapan penggunaan laba; pengesahan laporan tahunan; penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah; dan jaminan aset berjumlah lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Badan Usaha Milik Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Dalam hal pendirian BUMD, berdasarkan PP No. 54 tahun 2017 daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan melalui Perda. Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku. Sedangkan untuk perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Selanjutnya dalam pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, antara lain air minum, pasar, dan transportasi. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.

Kemudian untuk sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Badan Usaha Milik Daerah mendapatkan modal dari penyertaan modal daerah yang dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman; pinjaman yang bersumber dari daerah, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, dan/atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; hibah yang dapat bersumber dari pemerintah pusat, daerah, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, dan/atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan sumber modal lainnya yang dapat bersumber dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Modal yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

Selanjutnya pengaturan tentang penggunaan laba BUMD bagi perusahaan berbentuk perusahaan umum daerah, penggunaan laba perusahaan diatur dalam anggaran dasar yang digunakan untuk pemenuhan dana cadangan; peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan; deviden yang menjadi hak daerah; tantiem untuk anggota direksi dan dewan pengawas; bonus untuk pegawai; dan/atau penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penggunaan laba bagi perusahaan perseroan daerah memiliki pengaturannya sendiri, yaitu harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

Selain itu, BUMD dapat membentuk anak perusahaan yang dapat bermitra dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah lain, dan/atau badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. Namun, untuk membentuk anak perusahaan, harus memenuhi syarat seperti disetujui oleh KPM atau RUPS, memiliki minimal 70% saham dan sebagai pemegang saham pengendali, laporan keuangan selama tiga tahun terakhir dalam keadaan sehat, memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama, dan tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah.

PP No. 54 tahun 2017 tidak hanya mengatur tentang pendirian BUMD, tetapi juga menjelaskan regulasi terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD. Ketentuan penggabungan dalam peraturan ini memberikan dasar hukum bagi dua atau lebih perusahaan untuk bergabung menjadi satu perusahaan. Di samping itu, peraturan tersebut juga memungkinkan untuk membubarkan perusahaan yang diatur dalam peraturan

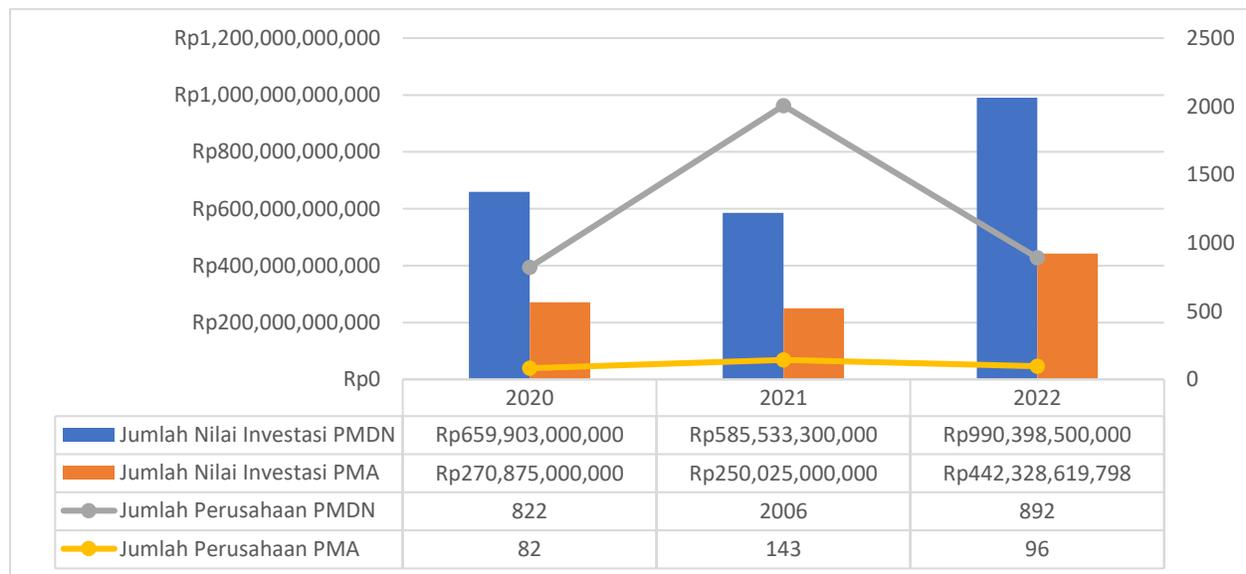
daerah, sehingga keuntungan hasil pembubaran dikembalikan kepada daerah. Untuk melaksanakan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran, harus memenuhi persyaratan seperti hasil analisis investasi, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi BUMD.

BAB III HASIL DAN ANALISIS

A. Potensi dan Peluang Ekonomi Kota Samarinda

Kota Samarinda memiliki berbagai potensi dan peluang ekonomi yang masih dapat dikelola, tidak hanya dari sumber daya tidak terbarukan namun juga berasal dari sumber daya terbarukan. Untuk realisasi investasi Kota Samarinda pada Triwulan I Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda mencatat realisasi investasi per Januari-Maret 2023 sebesar Rp 630.909.040.000 dengan rincian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 548.106.000.000 yang mencakup 956 proyek, dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 82.803.040.000 dengan 49 proyek.

Berdasarkan sektor usahanya, sektor Perdagangan dan Reparasi menyumbang kontribusi terbesar PMDN dengan 314 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 164.020.100.000. Sedangkan kontribusi investasi terbesar berdasarkan sektor usaha PMA adalah sektor pertambangan yang terdiri dari 5 proyek dengan nilai Rp 71.066.640.000 (DPMPTSP, 2023).



Sumber: satudata.samarindakota.go.id, 2023

Gambar 3.1. Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA Kota Samarinda Tahun 2020-2022

Selanjutnya, untuk menghitung sektor basis dan non-basis di suatu daerah, salah satu alat analisis yang digunakan adalah *Location Quotient* (LQ). Nilai LQ diperoleh dengan membandingkan kontribusi sektor terhadap output bruto suatu daerah dengan kontribusi

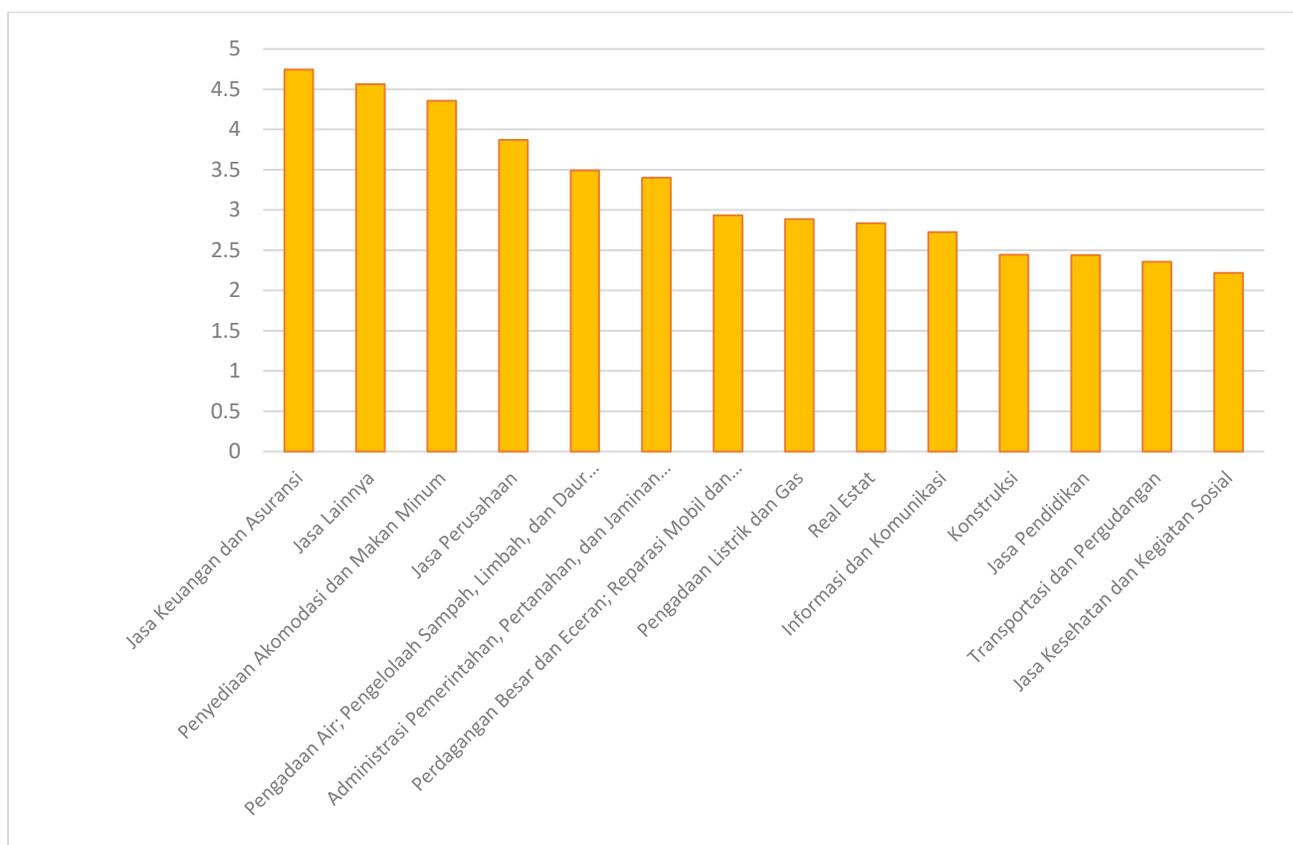
sektor tersebut terhadap nilai output bruto provinsi, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1. Perhitungan LQ Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Sektor		PDRB (dalam Miliar)					Si/S	Ni/N	LQ	Ket
		2018	2019	2020	2021	2022				
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	740,17	748,35	753,94	757,03	767,36	0,01555174	0,066479791	0,233931836	Non Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	5998,19	6337,08	6095,16	6286,88	6430,22	0,130318373	0,466156035	0,279559554	Non Basis
C	Industri Pengolahan	3408,88	3554,28	3413,06	3463,65	3639,08	0,073751596	0,196878834	0,374603985	Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	73,04	79,43	90,99	93,04	94,85	0,001922282	0,000666293	2,885041726	Basis
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	76	78,87	84,34	88,84	94,63	0,001917824	0,000549432	3,490555703	Basis
F	Konstruksi	8709,67	9068,58	8660,53	8821,02	9510,6	0,192747048	0,078804774	2,445880349	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7259,65	7649,08	7790,89	8070,8	8621,09	0,174719749	0,059540844	2,934451995	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	2890,44	3121,19	3108,61	3208,75	3513,8	0,071212602	0,030230406	2,355661455	Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1678,02	1806,58	1739,05	1773,84	1943,89	0,039395943	0,009043543	4,356251056	Basis
J	Informasi dan Komunikasi	1931,78	2055,31	2205,51	2381,48	2581,31	0,052314247	0,019188123	2,726386859	Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3122,3	3201,05	3288,51	3359,5	3705	0,075087567	0,015829791	4,743433909	Basis
L	Real Estat	1150,98	1185,6	1208,85	1184,23	1215,09	0,024625682	0,008688714	2,834214926	Basis
M,N	Jasa Perusahaan	345,49	351,35	339,1	344,16	362,43	0,007345206	0,001897309	3,871380359	Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	2575,99	2687,33	2586,57	2656	2894,05	0,058652408	0,017241719	3,40177267	Basis
P	Jasa Pendidikan	1655,1	1732,88	1764,22	1785,22	1825,92	0,037005098	0,015172448	2,438966914	Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	586,81	624,38	738,02	838,86	874,99	0,017733028	0,007998871	2,2169414	Basis
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1121,05	1210	1173,97	1181,11	1268,08	0,025699606	0,005633073	4,562271461	Basis

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2023; BPS Prov. Kaltim, 2023; data diolah

Dari perhitungan LQ di atas, terlihat bahwa dari 21 sektor PDRB Kota Samarinda, 18 sektor yang masuk dalam kategori Basis dan 3 sektor masuk dalam sektor Non Basis. Ketiga sektor tersebut adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan. Adapun sektor- sektor yang masuk dalam sektor basis diurutkan berdasarkan nilai LQ tertinggi dan terendah terlihat pada grafik berikut:



Sumber: data diolah, 2023

Gambar 3.2. Nilai *Location Quotient* (LQ) Tertinggi Hingga Terendah

Selain perhitungan *Location Quotient* (LQ), dilakukan juga analisis sektor unggulan Kota Samarinda menggunakan perhitungan tipologi Klassen dengan menghitung laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB, dan hasilnya ditunjukkan pada matriks berikut:

Tabel 3.2. Matriks Tipologi Klassen di Kota Samarinda

Kontribusi Sektoral terhadap Subsektor Laju Pertumbuhan Komoditas	Yik Komoditas > Yi Subsektor	Yik Komoditas < Yi Subsektor
rik komoditas > ri Subsektor	Komoditas Prima (Kuadran I) <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi • Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan • Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Lainnya 	Komoditas Berkembang (Kuadran III) <ul style="list-style-type: none"> • Industri Pengolahan
rik komoditas < ri Subsektor	Komoditas Potensial (Kuadran II) <ul style="list-style-type: none"> • Transportasi dan Pergudangan • Jasa Perusahaan • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Pengadaan Listrik dan Gas • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 	Komoditas Terbelakang (Kuadran IV) <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Pertambangan dan Penggalian

Keterangan:

Rik = laju pertumbuhan komoditas i di tingkat Kota

Ri = laju pertumbuhan komoditas i di tingkat Provinsi

Yik = kontribusi sektor i terhadap subsektor Kota Samarinda

Yi = kontribusi sektor i terhadap subsektor Provinsi Kalimantan Timur

Perhitungan tipologi Klassen menempatkan 11 sektor atau sebesar 52% dari seluruh sektor PDRB sebagai komoditas prima atau pada kuadran I. Beberapa sektor yang masuk di dalamnya adalah sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa keuangan. Sedangkan pada kuadran II terdapat industri pengolahan yang merupakan komoditas berkembang yang terlihat dari terus meningkatnya nilai PDRB sektor ini pada kurun waktu 2018-2022. Adapun sektor transportasi dan pergudangan, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang masuk pada kuadran III. Sayangnya, Kota Samarinda masih memiliki komoditas yang masuk pada kuadran IV yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 3.3. Data Luasan dan Persentase Sektor Investasi Ruang Kota Samarinda

No	Sektor	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8058,68	37,54%
2	Pertambangan dan Penggalian	7575,80	35,29%
3	Real Estat	3473,97	16,18%
4	Transportasi dan Pergudangan	446,32	2,08%
5	Industri Pengolahan	431,96	2,01%
6	Jasa Pendidikan	336,28	1,57%
7	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	327,91	1,53%
8	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	295,22	1,38%
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	157,68	0,73%
10	Konstruksi	71,44	0,33%
11	Penyediaan Akomodasi dan Makan	67,07	0,31%
12	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,06	0,21%
13	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Dingin	44,83	0,21%
14	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	42,13	0,20%
15	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	35,35	0,16%
16	Jasa Perusahaan	27,77	0,13%
17	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,14	0,05%
18	Jasa Lainnya	10,93	0,05%
19	Informasi dan Komunikasi	5,30	0,02%

Sumber: DPUPR PERA Kaltim, 2022

Dari tabel di atas, terlihat bahwa meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor non basis, namun luasan lahan yang tersedia masih sangat besar bahkan mendominasi luasan di Kota Samarinda. Sedangkan sektor real estate sangat potensial untuk dikembangkan, karena merupakan sektor basis dan didukung oleh ketersediaan lahan sebesar 16,18% dari keseluruhan lahan yang berada di Kota Samarinda. Selanjutnya akan dibahas beberapa sektor yang memiliki potensi dan peluang ekonomi di Kota Samarinda secara umum.

Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

Salah satu sektor yang bukan merupakan sektor basis namun memiliki potensi investasi adalah sektor pertanian. Luasan lahan yang dapat dikembangkan pada sektor pertanian

sebesar 37,54% dari total seluruh lahan investasi di Kota Samarinda. Sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan jumlah produksi maupun luas panen yang berpengaruh pada produktivitas komoditas yang dihasilkan. Beberapa jenis komoditas tanaman pangan di Kota Samarinda tahun 2020-2023 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3.4. Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kota Samarinda

No	Jenis Komoditas	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Padi			
	Produksi (Ton)	18.228,63	16.354,00	11.245,00
	Luas Panen (Ha)	3.698,80	3.454,07	2.100,75
	Produktivitas (Kuintal/Ha)	42,72	41,54	30,15
2	Jagung			
	Produksi (Ton)	335,81	338,45	341,25
	Luas Panen (Ha)	69,00	69,56	70,56
	Produktivitas (Kuintal/Ha)	38,40	38,40	39
3	Ubi Kayu			
	Produksi (Ton)	6.093,00	4.564,12	4.564,12
	Luas Panen (Ha)	172,40	84,70	84,70
	Produktivitas (Kuintal/Ha)	353,42	404,85	404,85
4	Ubi Jalar			
	Produksi (Ton)	282,00	328,49	328,49
	Luas Panen (Ha)	38,10	39,40	39,40
	Produktivitas (Kuintal/Ha)	74,02	67,85	67,85

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

Dari tabel di atas, terlihat bahwa komoditas tanaman pangan yang berpotensi untuk dikembangkan adalah tanaman jagung. Hal ini karena tren produksi, luas panen, serta produktivitasnya terus meningkat pada tahun 2020-2022. Potensi tanaman jagung berada di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Kunjang, dan Kecamatan Palaran (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023).

“Di komoditas jagung kita ada potensi lahan. Jagung ini sebagai bahan baku untuk pakan ternak dan ikan, dan potensial sekali untuk dikembangkan menjadi potensi pendapatan daerah. Karena di Kaltim ini belum ada pabrik pakan, makanya harga

ternak dan ikan bisa fluktuatif karena pakannya. Padahal bahan jagungnya bisa kita tanam.” (wawancara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 2023)

Kota Samarinda telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan ini menetapkan lahan seluas 1.230,880 Ha untuk lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan. Adapun terdapat lahan cadangan seluas 728 Ha yang meskipun tidak dibuat peraturan daerah, namun boleh dialihfungsikan (wawancara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023). Berdasarkan hasil wawancara juga diperoleh informasi terkait lahan hortikultura sekitar 10.008 Ha yang diperuntukkan bagi komoditas buah, sayur, dan tanaman obat.

“Dari 10.008 Ha lahan itu kalau bisa kita alokasikan untuk tanaman jagung tiap kecamatan 50 Ha saja, dengan potensi jagung 4-5 ton dan harga Rp5.000, berapa banyak yang dapat dihasilkan. Artinya, ini potensi besar, dan bisa menutupi kebutuhan pakan ternak”. (wawancara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 2023)

Selanjutnya untuk komoditas perkebunan, beberapa potensi yang dimiliki Kota Samarinda adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada, dan kemiri. Adapun komoditas lain yang didorong untuk dikembangkan adalah tanaman aren. Kota Samarinda memiliki total lahan untuk komoditas aren seluas 13,50 Ha di tahun 2022. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, nilai jual aren lumayan namun kendala yang dihadapi ialah pengembangan kawasan karena lahan-lahan dimiliki oleh masyarakat yang pengelolaannya secara turun-temurun. Padahal dengan menjamurnya hotel dan kafe, ini dapat menjadi peluang ekonomi sebagai alternatif gula.

Adapun dari produksi ternak dan daging, mayoritas ternak di Kota Samarinda adalah ternak unggas, terutama ayam. Populasi ternak dan daging dalam kurun waktu 2020-2022 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3.5. Data Populasi Ternak dan Produksi Daging di Kota Samarinda
Tahun 2020-2022

No	Uraian	Populasi (Ekor)			Produksi Daging (Kg)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Sapi	6.599	6.674	6.772	1.565.600,40	1.353.158	975.815
2	Kambing	6.951	7.056	6.850	80.257,50	148.446	172.463
3	Domba	214	214	0	0	0	0
4	Babi	12.450	12.450	1.653	167.108,70	192.172	97.688
5	Unggas	835.213	1.176.725	16.449.117	15.011.873,86	11.885.386	11.962.559
Jumlah		861.427	1.203.119	16.514.508	16.824.840,46	13.579.162	13.208.525

Sumber: Lakip Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2021; 2022

Dari tabel di atas, diketahui bahwa produksi unggas terutama ayam menempati posisi teratas populasi terbanyak dan merupakan potensi ternak di Kota Samarinda. Hal ini ditunjang dengan telah tersedianya Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) dengan potensi penyembelihan minimal 40.000 ekor per hari, yang letaknya tersebar di 10 kecamatan (hasil wawancara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023). Komoditas ini juga dimanfaatkan oleh BUMD milik Kota Samarinda yaitu Perumda Varia Niaga dengan menjual ayam beku, di samping komoditi lain misalnya minyak goreng, telur, dan beras.

“Kita sudah punya mini cold storage 2 dengan kapasitas 15 ton/storage. Nanti kita juga akan mendapat bantuan dari Pemkot melalui Dinas Perdagangan tahun ini, sekitar kapasitas 60 ton. Kita bekerjasama dengan perusahaan ayam Mojokerto. Untuk 30 ton butuh waktu 1 minggu untuk menghabiskannya. Sebenarnya kalau putaran bagus (penghambatnya cuaca/kapal) maka dalam satu bulan harapannya perputarannya bisa sampai 90 ton. Ayam beku ini prospeknya bagus untuk UMKM karena ambilannya besar, sekali ambil bisa 5 ton, bahkan daerah lain ambil ke kita juga. Ayam beku kita adalah ayam beku termurah di Samarinda.” (wawancara Varia Niaga, 2023)

Jika dirinci, populasi ayam memang terus meningkat, misalnya ayam ras petelur yang meningkat dari 266.720 ekor di tahun 2021 menjadi 313.209 ekor di tahun 2022, serta ayam lokal dari 721.274 ekor di tahun 2021 meningkat menjadi 863.913 ekor di tahun 2022.

Pada sektor perikanan, hasil wawancara dengan Dinas Perikanan Kota Samarinda menyatakan bahwa terdapat potensi perikanan khususnya pada perikanan tangkap dan budidaya. Pada perikanan budidaya, Kota Samarinda memiliki 72 kelompok pembudidaya dengan 760 pembudidaya, dan jumlah produksi sebesar 893,5 ton di tahun 2022 (BPS Kota Samarinda, 2023). Adapun pada produksi perikanan tangkap, jumlah produksi menurun dari 18.998,4 ton di tahun 2020 menjadi 9.420 ton di tahun 2022 (satudata.samarindakota.go.id, 2023).

“Ada kampung lele di Bantuas, itu kurang lebih 3 kelompok pembudidaya yang komoditi utamanya adalah ikan lele, dan itu sudah terkoneksi hingga tingkat RT. Ada peluang karena produksi lele kita tertinggi se-Kaltim (sekitar 600 ton/pertahun). Dengan bahan baku yang melimpah ini, harusnya diikuti oleh pengolahannya.” (wawancara Dinas Perikanan, 2023)

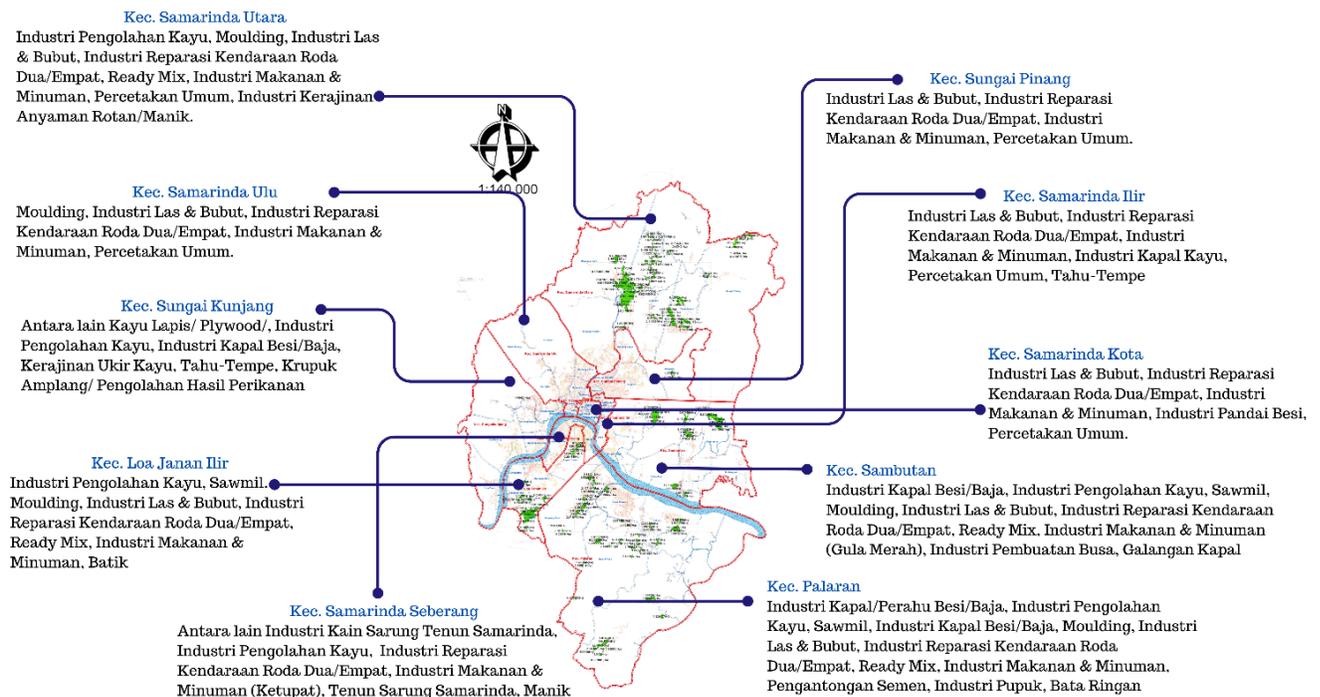
Salah satu komoditi perikanan yang dapat dikembangkan adalah ikan lele, dan hal ini telah direncanakan untuk mengembangkan Kampung Lele pada wilayah yang sesuai (Renstra Dinas Perikanan, 2021). Saat ini di Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir telah

terdapat satu keramba apung yang berisi ikan nila, lele, dan mas. Ke depannya akan dibangun dua keramba apung lagi (wawancara dengan Kec. Loa Janan Ilir, 2023). Namun kendala yang dihadapi terkait komoditi ini adalah harganya yang relatif rendah (stagnan), sementara biaya produksi terus meningkat (Lakip Dinas Perikanan, 2023).

Sektor Koperasi, UKM, dan Perindustrian

Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Samarinda dalam mendukung visi misi walikota Samarinda, melaksanakan salah satu dari 10 program prioritas Pemerintah Kota Samarinda yaitu Program Penciptaan 10.000 wirausaha baru (Renstra Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian, 2021). Menurut hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian, produk UKM akan didorong untuk diperkenalkan ke luar daerah dan diletakkan di pusat perbelanjaan. Sedangkan untuk di Kota Samarinda, akan diletakkan di hotel-hotel Kota Samarinda. Selain itu, saat ini Pemerintah Kota Samarinda sedang menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu, dan memberikan hasil guna lebih optimal bagi daerah.

Gambar 3.3. Produk Unggulan Industri Kota Samarinda Berdasarkan Kecamatan

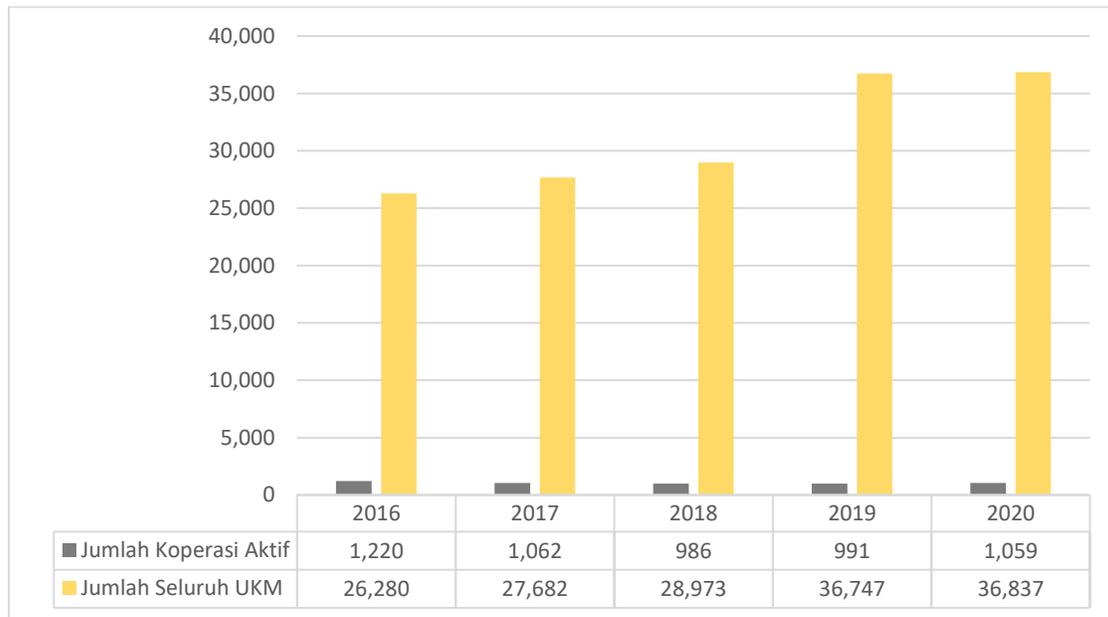


Sumber: Renstra Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian, 2021; Hasil Wawancara, 2023

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri, Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian melaksanakan beberapa kegiatan bimbingan teknis industri, antara lain fasilitasi industri berupa pendaftaran merk/HAKI, halal dan pembinaan terkait kesadaran wajib SNI. Fasilitasi sertifikat halal diberikan pada 10 IKM, dan sosialisasi merk/HAKI/SNI diikuti oleh 20 orang peserta. Selain itu, kegiatan lain dilakukan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Samarinda, melaksanakan pameran promosi unggulan IKM dan workshop pelaku usaha yang diikuti oleh 100 orang wirausaha. (LAKIP Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian, 2021).

“Dalam hal UMKM, masyarakat antusias tapi kendalanya terkait modal, cara pemasaran, dan tempat. Beberapa waktu yang lalu kami menjembatani dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota dengan pelaku industri jadi segala permasalahan bisa disampaikan langsung. Pelaku usaha menginginkan pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan, tidak stagnan”. (wawancara Kecamatan Samarinda Utara, 2023)

Jumlah pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi aktif di Kota Samarinda menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahun. Dalam kurun waktu 2016-2020, rata-rata persentase koperasi aktif sebesar 83,02%, dan UKM aktif sebesar 86,8%.



Sumber: Renstra Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian, 2021

Gambar 3.4. Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Seluruh UKM Kota Samarinda Tahun 2016-2020

Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor basis di Kota Samarinda, dan sektor ini masih merupakan sektor primadona dan mampu menyerap 28-35 persen tenaga kerja, tertinggi dibanding sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan peran Kota Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan.

Saat ini, Pemerintah Kota Samarinda mengelola 12 pasar yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan (SKTUB). Jumlah pedagang yang memiliki SKTUB meningkat setiap tahun, terlihat sebagai berikut.

Tabel 3.6. Jumlah Pedagang Yang Memiliki SKTUB

No	Nama Pasar	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasar Segiri	737	764	996	1143	1176
2	Pasar Pagi	823	859	926	989	1020
3	Pasar Sei Dama	198	246	273	284	286
4	Pasar Merdeka	234	239	284	312	313
5	Pasar Loa Bahu	192	195	196	196	196
6	Pasar Kemuning	87	90	115	119	119
7	Pasar Kedondong	364	416	452	537	550
8	Pasar Ijabah	172	180	202	223	223
9	Citra Niaga	130	144	145	154	154
10	Pasar Bengkuring	53	53	55	55	55
11	Pasar Baqa	321	325	325	325	325
12	Pasar Palaran	98	98	98	98	98
Jumlah		3409	3609	4067	4435	4515

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan, 2021

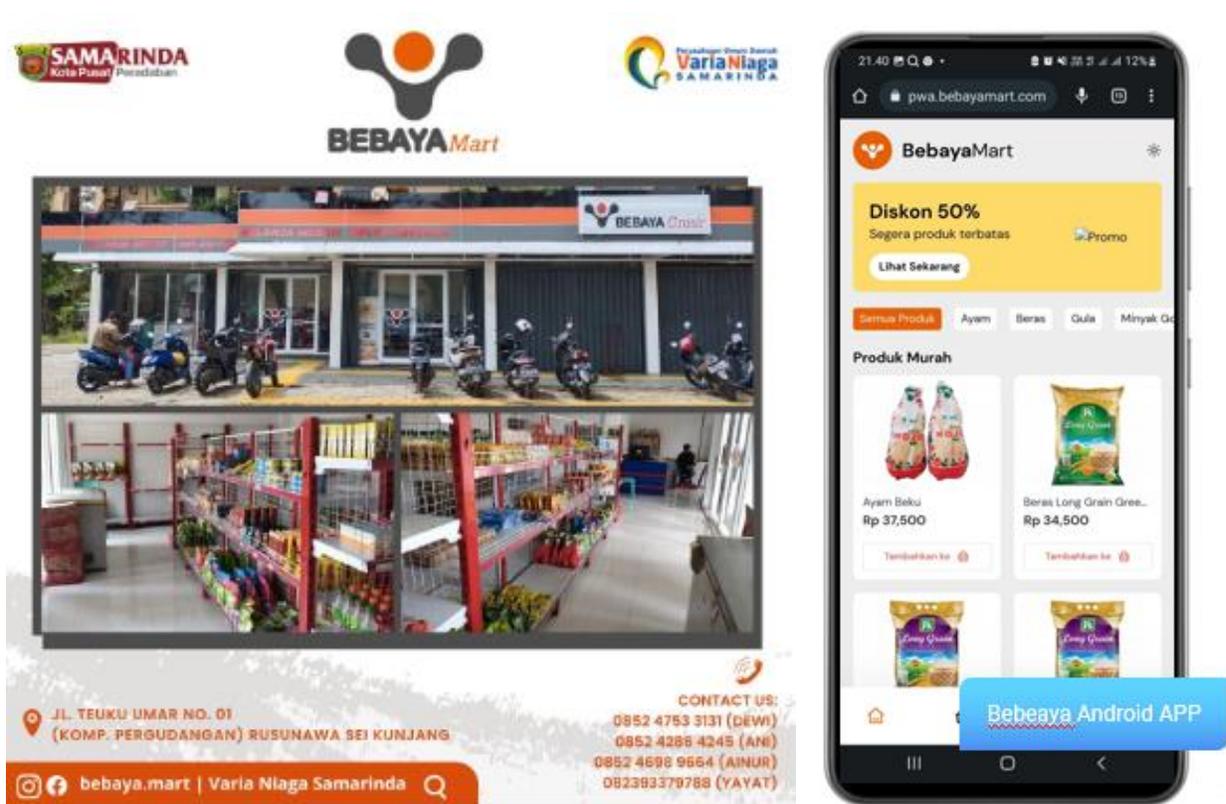
Untuk penataan dan pembinaan pasar rakyat, Kota Samarinda telah mengaturnya dengan menerbitkan Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pada pasal 37 aturan ini, pembinaan terhadap pengelolaan pasar rakyat dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut: (1) mengembangkan sistem manajemen pengelolaan pasar rakyat yang baik; (2) memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di pasar rakyat; (3) fasilitasi kerja sama antara pedagang pasar rakyat dan pemasok; dan/atau (4) melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat.

“Selain pasar, kita juga ada pembangunan gudang, minimarket yang milik pemerintah. Salah satunya ada lahan milik Pemkot letaknya di Jl. P. Antasari sekitar 1 kapling. Di

tahun 2023 ini dianggarkan Rp700 juta untuk dibangun sarana perdagangan disitu, khususnya Gudang dan minimarket. Bangunan ini akan diserahkan ke BUMD dalam rangka pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi lokal (bebaya mart).” (wawancara Dinas Perdagangan, 2023)

Bebaya Mart merupakan usaha retail yang dimiliki oleh Kota Samarinda dan dijalankan oleh Perumda Varia Niaga, berfokus pada distribusi dan perluasan usaha pangan serta berperan aktif dalam menjaga kestabilan pangan di Kota Samarinda (Perumda Varia Niaga, 2023). Bebaya Mart terletak di Jl. Teuku Umar dan saat ini telah dapat diakses lewat aplikasi.

“Di kecamatan kita pengen punya bebaya mart, sehingga orang terintegrasi disitu, dan itu dikelola bumkel. Kolaborasinya kesitu nanti. Kita juga nanti tidak repot ketika ada kelangkaan minyak goreng, kita tinggal distribusi saja. Ini yang ditiru oleh daerah-daerah lain, misalnya Kota Kubu Raya kesini untuk melihat usaha kita, Sulawesi dan BI juga sudah melihat pola usaha kita.” (wawancara Perumda Varia Niaga, 2023)



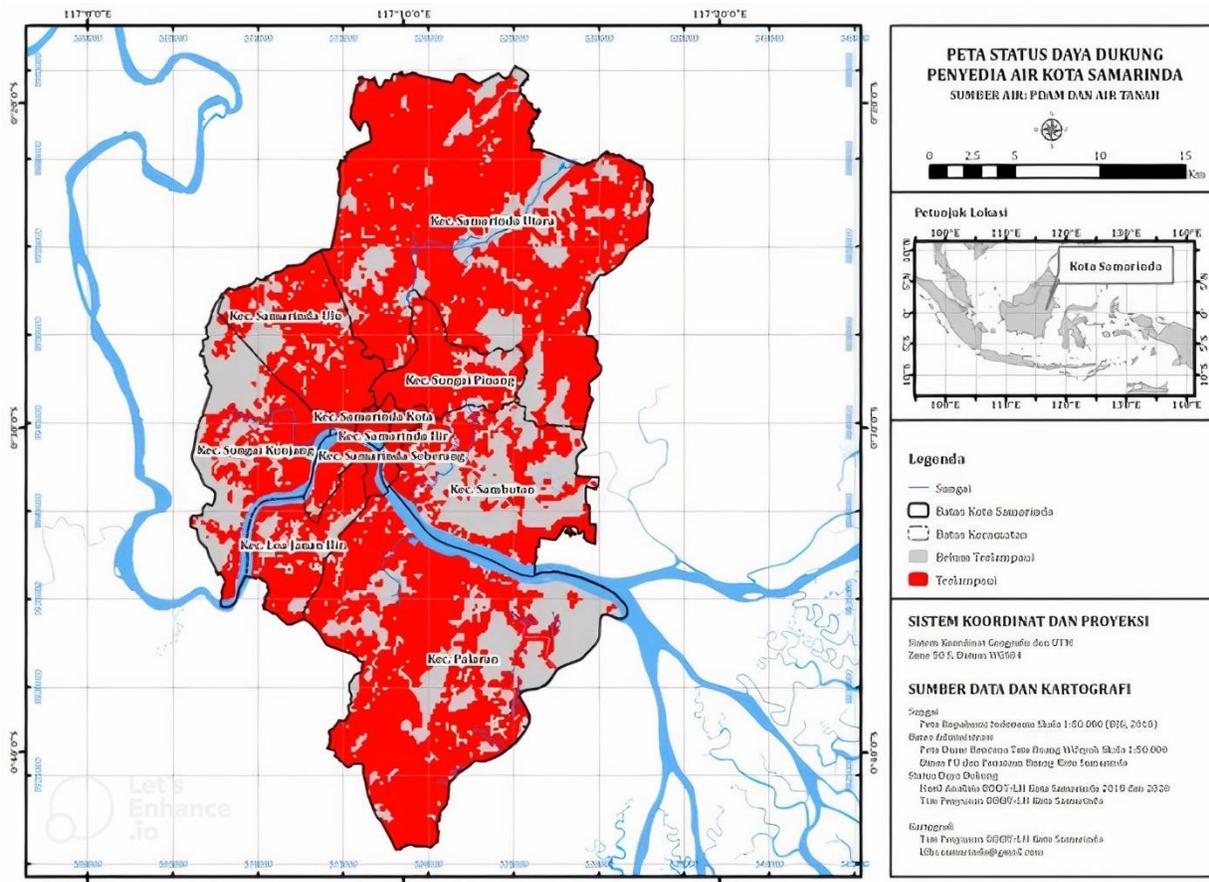
Sumber: Perumda Varia Niaga, 2023

Gambar 3.5. Bebaya Mart dan Aplikasi Bebaya Mart

Ke depannya, Dinas Perdagangan Kota Samarinda menasar Bebaya Mart untuk dibangun di setiap RT, dan akan menjual kebutuhan masyarakat yang berada di setiap RT. Anggaran yang disediakan sebesar Rp40 juta, dengan masyarakat menyediakan tempat dan Perumda Varia Niaga yang akan mengisi dagangannya. Selain Bebaya Mart di tingkat RT, Dinas Perdagangan juga merencanakan membangun Bebaya Grosir yang tujuannya agar masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah dan dapat dijual kembali yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat (www.insitekaltim.com, 2023).

Sektor Air

Sektor air merupakan salah satu sektor basis yang berada di Kota Samarinda. Hingga tahun 2022, persentase rumah tangga dengan akses terhadap layanan air minum berkualitas (layak) telah mencapai 94,31%, dan angka ini cenderung meningkat setiap tahun (BPS Kaltim, 2023). Persediaan air di Kota Samarinda ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi, dan lahan seluas 2.553,37 Ha atau 3,56% dari jumlah keseluruhan lahan di Kota Samarinda (DPMPTSP Prov. Kaltim, 2021). Di tahun 2023, PDAM Tirta Kencana Samarinda akan melakukan penambahan kapasitas di sejumlah instalasi pengolahan air (IPA) yang akan dilakukan di daerah Loa Bakung dengan tambahan kapasitas 50 liter/detik, serta di IPA Bengkuring sebesar 60 liter.detik (klicksamarinda.com, 2023). Adapun jumlah pelanggan aktif PDAM hingga Desember 2022 tercatat sebanyak 163.617 pelanggan, serta telah menghasilkan laba yang meningkat dari Rp12 Miliar di tahun 2021 menjadi Rp43,1 Miliar di tahun 2022 dan secara signifikan menyumbang PAD untuk Kota Samarinda (hasil wawancara PDAM, 2023).



Sumber: RPJMD Kota Samarinda, 2021

Gambar 3.6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) Penyedia Air dari Air PDAM dan Air Tanah Tahun 2020

Dari gambar di atas, terlihat bahwa warna merah menandakan sebagian besar wilayah Kota Samarinda telah terlampaui daya dukung lingkungan hidup untuk fungsi penyedia air. Dengan semakin meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses air bersih di Kota Samarinda, membuka peluang pemanfaatan air untuk bisnis lainnya. Misalnya disampaikan saat wawancara dengan Perusda Varia Niaga.

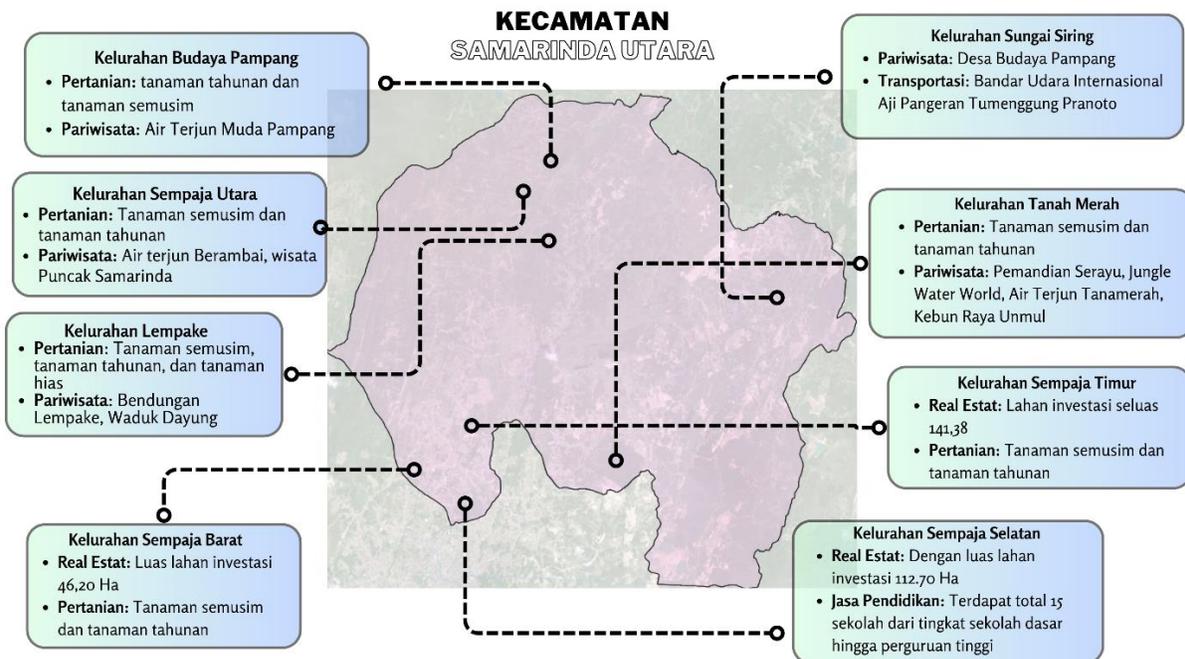
“Jasa air bersih, kerjasama dengan PDAM untuk memberikan layanan air bersih (baku) di kapal. Ini sebetulnya kita mau kerjasama dengan Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) yang ada di Muara Berau. Kalau main ini dan bisa masuk untuk konsumsi di mother vessel luar biasa, karena hitungannya dollar dan potensinya besar sekali”. (wawancara Varia Niaga, 2023)

Selanjutnya, secara khusus akan dibahas potensi dan peluang ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan di Kota Samarinda yang digambarkan dalam bentuk peta potensi. Peta potensi per-kecamatan ini diolah oleh tim analis dari hasil wawancara dengan perangkat daerah, data BPS, dokumen RTRW Kota Samarinda, dokumen DPUPR Provinsi Kalimantan Timur, serta dokumen investasi DPMPTSP Kota Samarinda.

1. Kecamatan Samarinda Utara

Kecamatan Samarinda Utara memiliki luas wilayah 221, 29 km² yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di bagian utara, timur dan barat, serta Kecamatan Sungai Pinang di sebelah selatan dengan jumlah populasi mencapai 106.975 jiwa (BPS Kota Samarinda, 2023).

Sektor pertanian merupakan sektor dengan luasan terbesar di Kecamatan Samarinda Utara, yaitu sebesar 3.192,82 Ha atau 48,40% dari total seluruh luasan investasi di Kecamatan Samarinda Utara (DPUPR PERA Kaltim, 2022). Kecamatan Samarinda Utara menjadi salah satu dari 3 kecamatan yang dijadikan pusat pengembangan pertanian perkotaan karena masih memiliki potensi yang besar dan sangat mendukung pengembangan pertanian perkotaan (RPJMD Kota Samarinda, 2021).



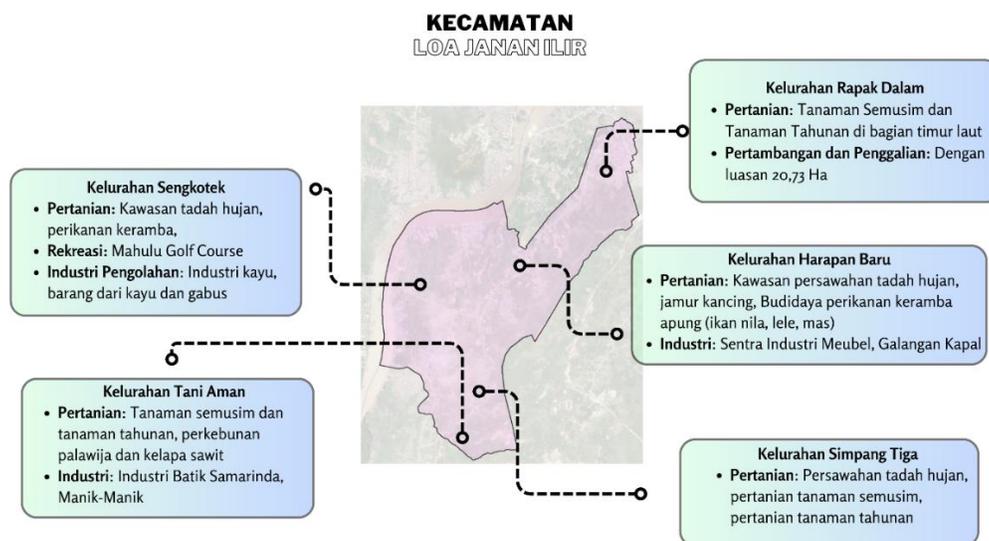
Sumber: data diolah, 2023

Gambar 3.7. Peta Potensi Ekonomi di Kecamatan Samarinda Utara

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2024, disebutkan pada Pasal 47 menetapkan Kecamatan Samarinda Utara sebagai kawasan perkebunan dengan komoditas utama tanaman kakao, Kawasan peternakan dengan komoditas utama ternak sapi, Kawasan peternakan unggas khususnya di Kelurahan Tanah Merah dan Sungai Siring, Kawasan RPH Ruminansia seluas 7,311 Ha di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara. Kawasan peruntukan lainnya yaitu Kawasan pembenihan ikan yaitu unit pembenihan rakyat (UPR) di Kel. Tanah Merah, budidaya perikanan keramba jaring apung di Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Utara, dan Kelurahan Sempaja Selatan. Kawasan Benanga Kelurahan Lempake menjadi Kawasan pelestarian ekosistem air tawar spesifik lokal antara lain ikan jelawat, sepat, belida, dan biawan.

2. Kecamatan Loa Janan Ilir

Hingga tahun 2022, Kecamatan Loa Janan Ilir memiliki penduduk sebanyak 65.983 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2022 sebesar 0,07% (BPS Kota Samarinda, 2023). Kecamatan Loa Janan Ilir memiliki luas 26,13 km² dan diperkuat oleh 5 kelurahan. Salah satu potensi Kecamatan Loa Janan Ilir adalah pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang didukung oleh luasan lahan sebesar 494,27 Ha atau 41,67% dari total seluruh sektor investasi yang ada di Kecamatan Loa Janan Ilir (DPUPR PERA Kaltim, 2022).



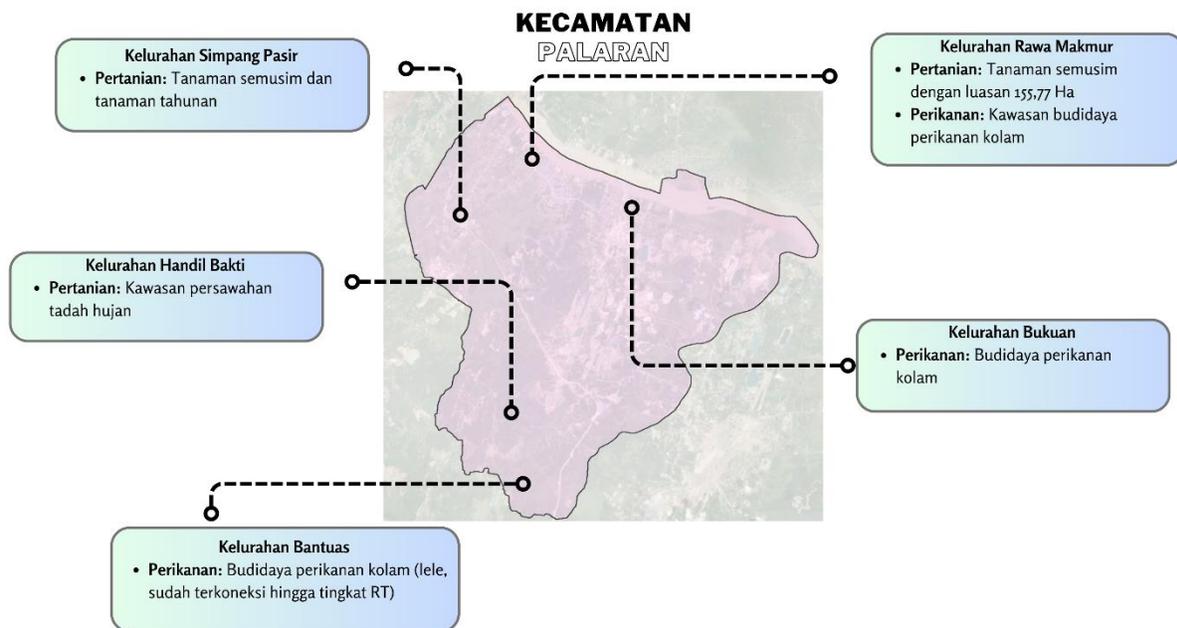
Sumber: data diolah, 2023

Gambar 3.8. Peta Potensi Ekonomi di Kecamatan Loa Janan Ilir

Dalam dokumen RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2024, diketahui bahwa Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Sengkotek dijadikan kawasan peruntukan perikanan khususnya budidaya perikanan keramba dengan jumlah produksi mencapai 66,3 ton di tahun 2021 dan menjadi yang tertinggi di Kota Samarinda. Selain itu, Kelurahan Tani Aman dijadikan kawasan rumah potong unggas (RPU) dengan luas 0,5 Ha.

3. Kecamatan Palaran

Kelurahan Palaran yang beribukota di Rawa Makmur memiliki luas area sebesar 221,29 km² dan menjadi kecamatan terluas kedua setelah Kecamatan Samarinda Utara. Secara spasial, Kecamatan Palaran didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan total luasan sebesar 3.827,08 Ha atau 57,60% dari total keseluruhan sektor investasi di Kecamatan Palaran (DPUPR PERA Kaltim, 2022).



Sumber: data diolah, 2023

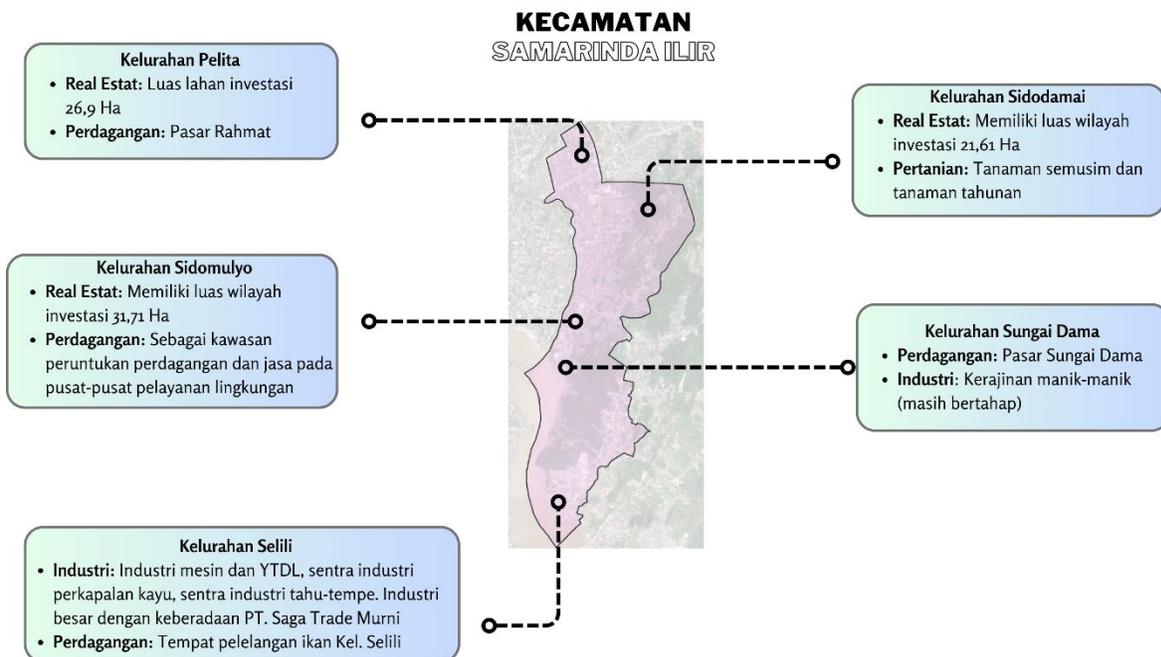
Gambar 3.9. Peta Potensi Ekonomi di Kecamatan Palaran

Sektor utama di Kecamatan Palaran ialah sektor pertambangan dan Penggalian, khususnya untuk pertambangan pasir sungai dan pertambangan batu bara (RTRW Kota Samarinda, 2014). Sektor kedua terbesar di Kecamatan Palaran adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan luasan 2.144,91 Ha atau 32,28%, bahkan menjadi salah satu dari 3

kecamatan yang menjadi pusat pengembangan pertanian perkotaan (RPJMD Kota Samarinda, 2021). Beberapa tanaman sayuran dengan produksi cukup besar antara lain cabai rawit yang menghasilkan 494 kuintal, tomat dengan hasil produksi 504 kuintal, dan bayam menghasilkan 358 kuintal (BPS Kota Samarinda, 2023). Adapun mayoritas tanaman pangan di Kecamatan Palaran tanaman padi dengan luas tanam sebesar 797,7 Ha dengan luas panen 903 Ha, serta tanaman jagung dengan luas tanam 46,5 Ha (BPS Kecamatan Palaran, 2022).

4. Kecamatan Samarinda Ilir

Kecamatan Samarinda Ilir memiliki luas wilayah sebesar 17,72 km², dengan wilayah terluas ada di Kelurahan Pelita yang memiliki area 8,92 km² atau 50,34% dari seluruh wilayah Kecamatan Samarinda Ilir. Adapun jumlah penduduk sebanyak 69.846 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,02 (BPS Kecamatan Samarinda Ilir, 2022).



Sumber: data diolah, 2023

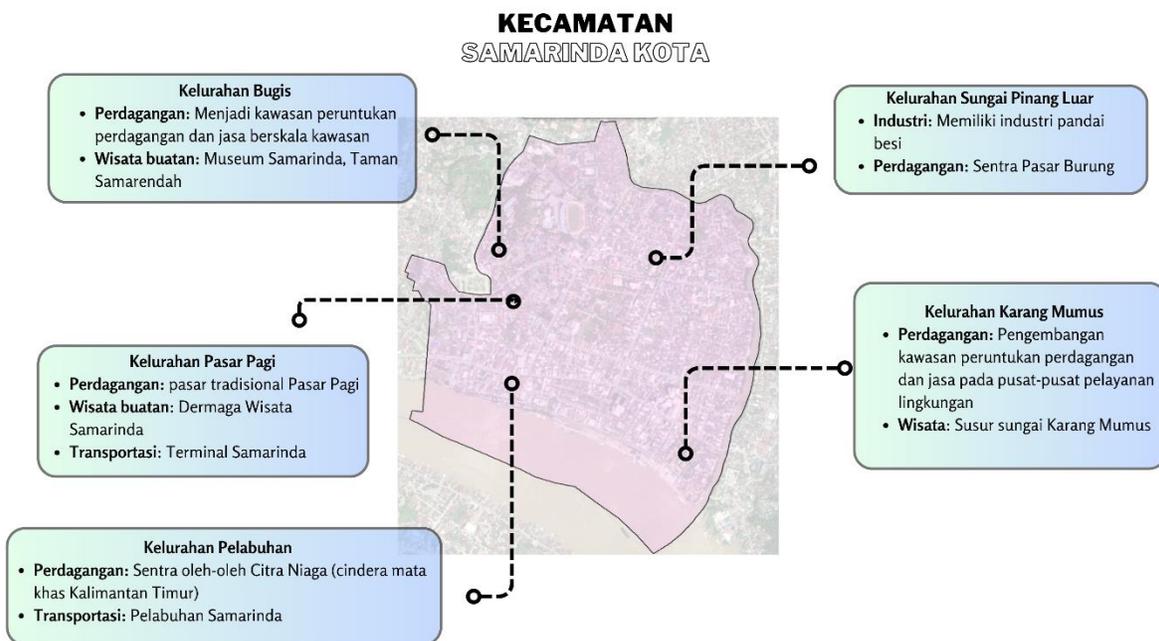
Gambar 3.10. Peta Potensi Ekonomi di Kecamatan Samarinda Ilir

Dilihat secara spasial, sektor investasi dominan di Kecamatan Samarinda Ilir adalah sektor real estat yang memiliki luasan sebesar 118,07 Ha, dan sektor terbesar kedua adalah sektor

industri pengolahan dengan luas sebesar 16,85 Ha. Hal ini sejalan dengan RTRW Kota Samarinda yang menyatakan bahwa Kecamatan Samarinda Ilir merupakan salah satu kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah dengan luas kapling 500 M² per unit. Sedangkan untuk industri pengolahan, Kecamatan Samarinda Ilir menjadi kawasan peruntukan industri kecil dan mikro berupa industri amplang, serta industri sedang dan besar berupa industri kayu dan pengolahan hasil hutan.

5. Kecamatan Samarinda Kota

Kecamatan Samarinda Kota memiliki luas wilayah 11,12 km² dan terdiri dari 5 kelurahan yaitu Kelurahan Bugis, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, dan Kelurahan Pinang Luar. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Samarinda Kota berjumlah 33.143 jiwa, dan Kelurahan terpadat berada di Kelurahan Sungai Pinang Luar dengan 12.326 jiwa atau 37,1% dari jumlah seluruh populasi Kecamatan Samarinda Kota (BPS Kecamatan Samarinda Kota, 2022).



Sumber: data diolah, 2023

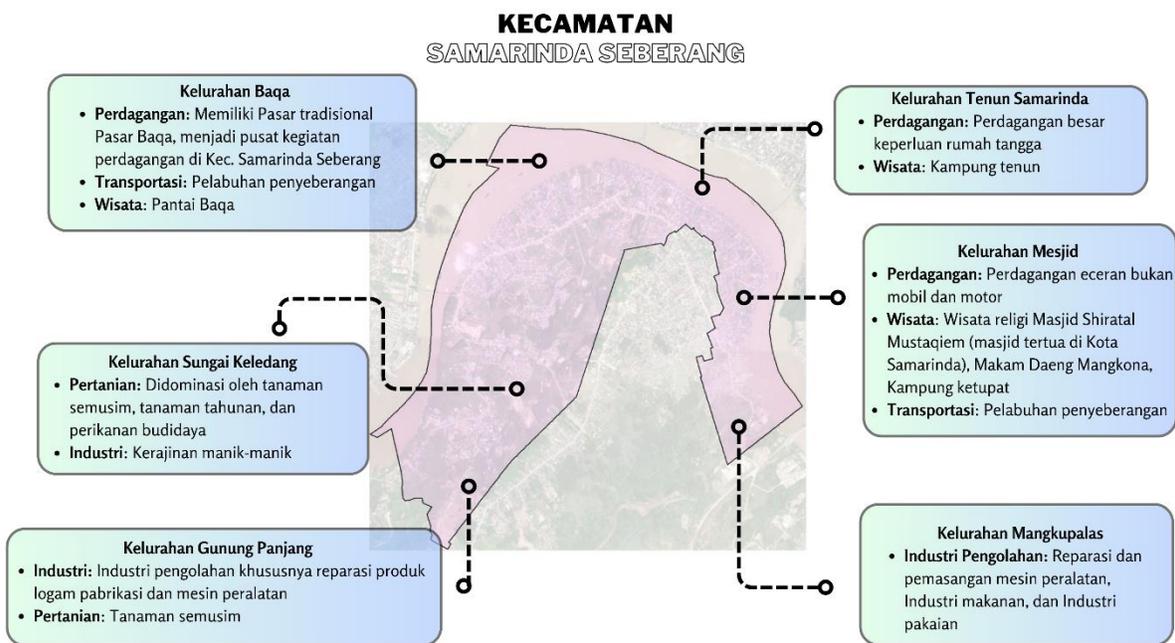
Gambar 3.11. Peta Potensi Ekonomi di Kecamatan Samarinda Kota

Secara spasial, potensi investasi Kecamatan Samarinda Kota adalah sektor perdagangan dengan lahan investasi sebesar 18,41 Ha. Pada dokumen RTRW Kota Samarinda,

Kecamatan Samarinda Kota diperuntukkan bagi sarana transportasi Pelabuhan khususnya yang berada di Kelurahan Pasar Pagi dan Kelurahan Pelabuhan. Dengan keberadaan dua Pelabuhan tersebut, Kecamatan Samarinda Kota juga dijadikan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota. Kuatnya sektor perdagangan juga ditunjukkan dengan jumlah toko sebanyak 632 buah dan 22 restoran/rumah makan (BPS Kecamatan Samarinda Kota, 2022).

6. Kecamatan Samarinda Seberang

Kecamatan Samarinda Seberang memiliki luas wilayah 9,66 km² dengan batas wilayah Sungai Mahakam di sebelah utara dan barat, Kecamatan Palaran dan Sungai Mahakam di sebelah timur, serta Kecamatan Loa Janan Ilir di sebelah selatan. Kecamatan Samarinda Seberang diperkuat oleh enam kelurahan yaitu Kelurahan Mesjid, Mangkupalas, Baqa, Tenun, Sungai Keledang, dan Gunung Panjang dengan 119 RT. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak 64.455 jiwa dengan kepadatan penduduk 6.672,36 penduduk per Km², dan kelurahan terpadat berada di Kelurahan Sungai Keledang dengan 17.052 jiwa (BPS Kecamatan Sungai Keledang, 2022).



Sumber: data diolah, 2023

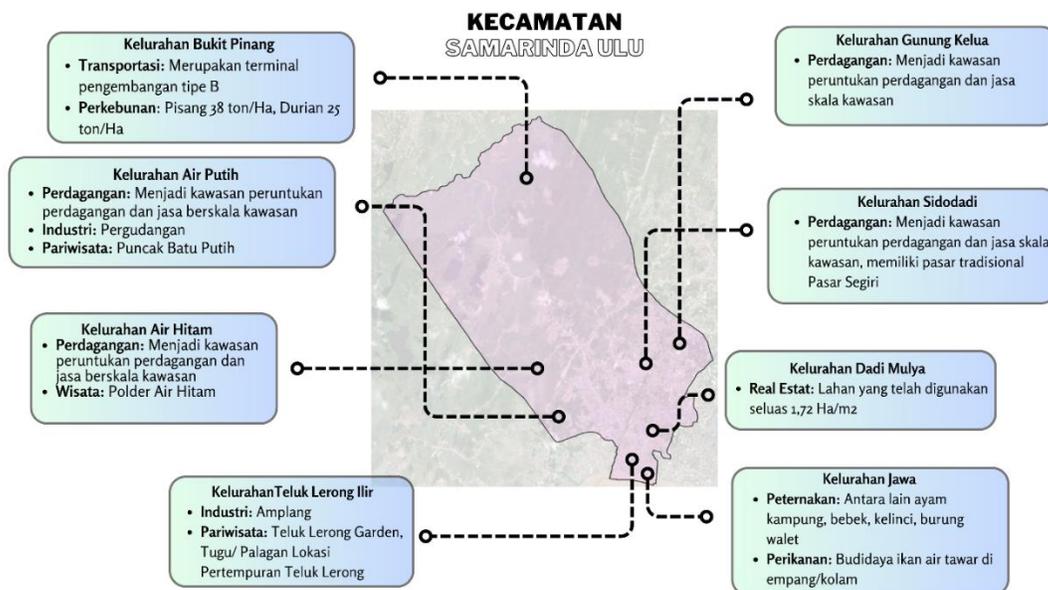
Gambar 3.12. Peta Potensi Ekonomi di Kecamatan Samarinda Seberang

Secara spasial, sektor industri menjadi salah satu yang terbesar dilihat dari sisi luasan lahan investasi, yaitu sebesar 40,33 Ha, sedangkan sektor lainnya yaitu sektor perdagangan dengan luas wilayah investasi seluas 12,05 Ha. Kecamatan Samarinda Seberang masuk dalam kawasan peruntukan industri sedang dan menengah yang meliputi industri sarung tenun, dan kawasan peruntukan industri besar berupa kawasan industri perkapalan baja.

Kecamatan Samarinda Seberang juga ternyata memiliki cukup banyak objek wisata misalnya pantai Baqa di Kelurahan Baqa, kampung tenun yang pemasarannya hingga ke Malaysia (hasil wawancara, 2023). Adapun di Kelurahan Masjid terdapat objek wisata religi yaitu Masjid Shiratal Mustaqiem yang merupakan masjid tertua di Kota Samarinda, makam Daeng Mangkona, serta wisata kampung ketupat yang bahan baku ketupatnya juga diperoleh dari wilayah Kecamatan Samarinda Seberang.

7. Kecamatan Samarinda Ulu

Kecamatan Samarinda Ulu memiliki luas wilayah 22,12 km² yang terbagi dalam 8 kelurahan dengan wilayah kelurahan terluas berada di Kelurahan Jawa yaitu seluas 7,68 km² atau 34,72% dari seluruh luas Kecamatan Samarinda Ulu. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 131.774 jiwa, dimana jumlah penduduk terbanyak menempati Kelurahan Air Putih yaitu sebanyak 29.224 jiwa.



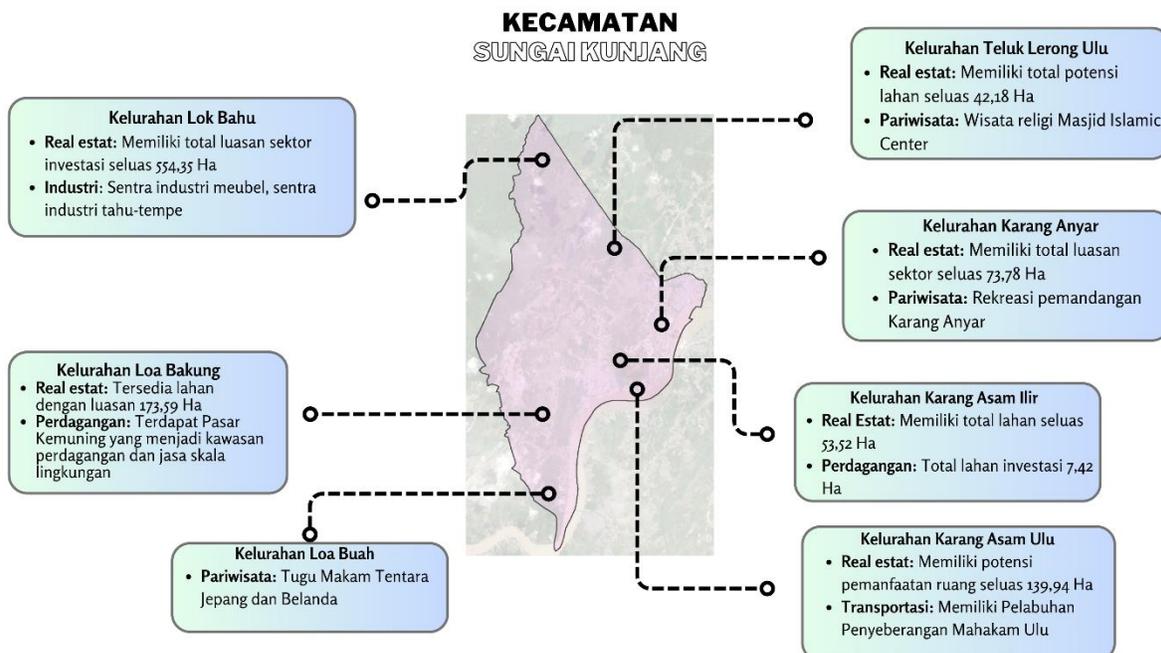
Sumber: data diolah, 2023

Gambar 3.13. Peta Potensi Ekonomi di Kecamatan Samarinda Ulu

Selain beberapa sektor yang terlihat pada gambar 3.13 di atas, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memiliki potensi investasi, terutama di wilayah Kelurahan Bukit Pinang, Air Hitam, dan Air Putih (DPUPR PERA Kaltim, 2022). Misalnya pada tanaman sayuran semusim cabe rawit yang mengalami peningkatan produksi dari 103 ton menjadi 133 ton (BPS Kecamatan Samarinda Ulu, 2022). Sedangkan sektor real estat juga menjadi potensi investasi khususnya di Kelurahan Air Hitam karena memiliki luasan terbesar di Kecamatan Samarinda Ulu.

8. Kecamatan Sungai Kunjang

Kecamatan Sungai Kunjang memiliki luas wilayah sebesar 43,04 Km², dengan 7 kelurahan dan 307 RT. Adapun jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana jumlah populasi pada tahun 2021 berjumlah 132.796 jiwa dengan kepadatan penduduk 30,59 per Km².



Sumber: data diolah, 2023

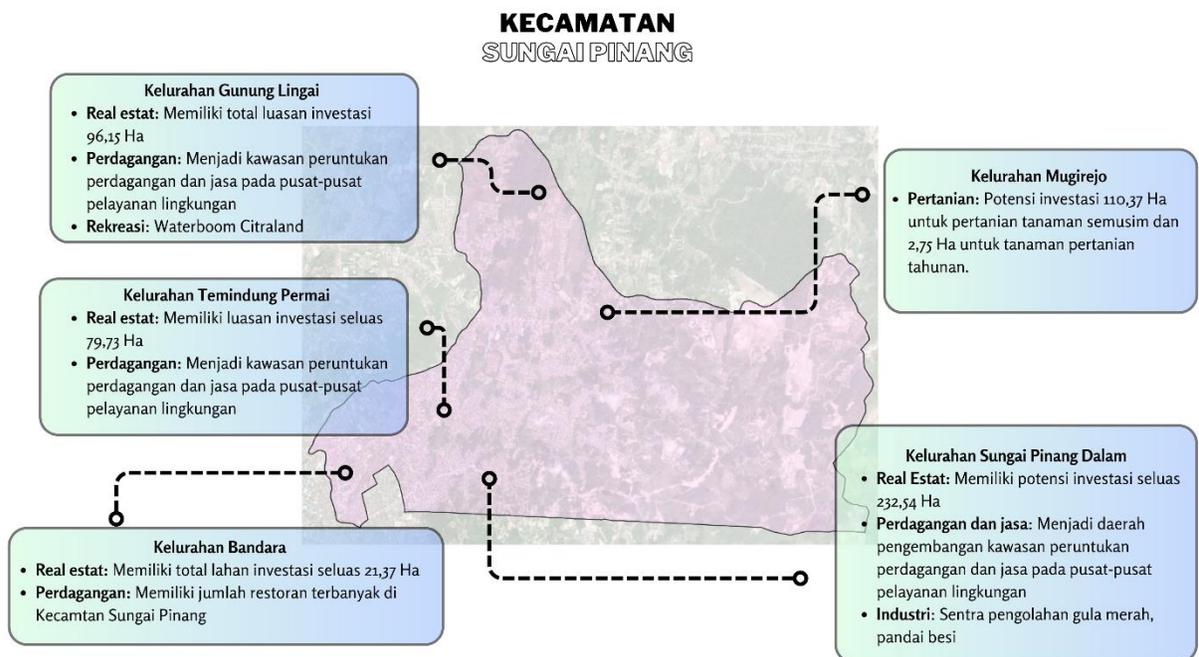
Gambar 3.14. Peta Potensi Ekonomi di Kecamatan Sungai Kunjang

Secara spasial, sektor dominan di Kecamatan Sungai Kunjang adalah sektor real estat dengan total luasan sebesar 797,56 Ha atau 48,40% dari total seluruh sektor investasi di Kecamatan Sungai Kunjang, yang antara lain berada di Kelurahan Loa Bakung, Karang Asam Ulu, Karang

Asam Ilir, Teluk Lerong Ulu, dan Karang Anyar. Hal ini sesuai dengan arah RTRW Kota Samarinda yang menunjuk Kecamatan Sungai Kunjang sebagai kawasan perkantoran pemerintahan. Kecamatan Sungai Kunjang juga masuk dalam kawasan peruntukan: (a) industri kecil dan mikro, antara lain industri amplang/pengolahan hasil perikanan, kerajinan manik, dan industri sapu ijuk; (b) industri sedang dan menengah, antara lain industri sarung tenun, industri perkapalan, dan industri kayu dan pengolahan hasil hutan, dan (c) industri besar yaitu kawasan industri perkapalan baja.

9. Kecamatan Sungai Pinang

Kecamatan Sungai Pinang berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Ilir di sebelah timur dan selatan, Kecamatan Samarinda Utara di sebelah utara, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Ulu. Kecamatan Sungai Pinang saat ini memiliki luas wilayah 34,16 Km² dan 5 kelurahan, serta 107.020 jumlah penduduk dimana hampir separuhnya merupakan penduduk Kelurahan Sungai Pinang Dalam (BPS Kecamatan Sungai Pinang, 2022).



Sumber: data diolah, 2023

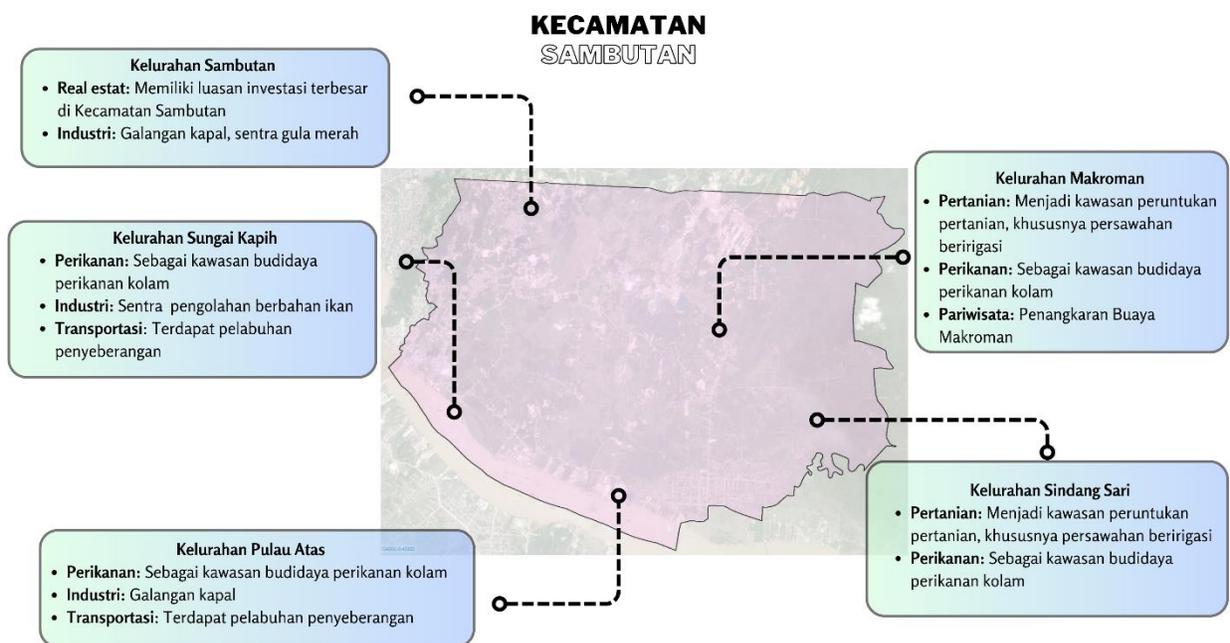
Gambar 3.15. Peta Potensi Ekonomi di Kecamatan Sungai Pinang

Dilihat secara kewilayahan, Kecamatan Sungai Pinang memiliki potensi investasi di sektor real estate, yakni sebesar 583,06 Ha atau 56,28% dari total luasan seluruh investasi di

Kecamatan Sungai Pinang. Dalam RTRW Kota Samarinda juga disebutkan bahwa Kecamatan Sungai Pinang menjadi salah satu kecamatan yang masuk dalam kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang. Pemanfaatan Sektor pertambangan khususnya batu bara juga menjadi salah satu potensi investasi di Kecamatan Sungai Pinang.

10. Kecamatan Sambutan

Kecamatan Sambutan memiliki luas wilayah 100,95 Km² dengan lima kelurahan dan 111 RT. Kelurahan Sambutan menjadi kelurahan terluas karena memiliki luas wilayah 31,00 Km² atau 30,71% dari luas seluruh Kecamatan Sambutan, sedangkan Kelurahan Sindang Sari menjadi kelurahan terkecil dengan luas wilayah hanya 1,70 Km².



Sumber: data diolah, 2023

Gambar 3.16. Peta Potensi Ekonomi di Kecamatan Sambutan

Secara spasial, Kecamatan Sambutan memiliki potensi investasi terbesar pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu seluas 1.475,34 Ha atau 63,60% dari total luasan seluruh sektor investasi di Kecamatan Sambutan, khususnya berada di Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sindang Sari (DPUPR PERA Kaltim, 2022). Komoditas padi memiliki luas 327,5 Ha dengan hasil 9,5 ton/ha, tanaman jagung memiliki lahan seluas 57,25 Ha dengan hasil 306 ton/ha, sedangkan komoditas perikanan antara lain ikan nila dengan 1.700

ton/tahun, ikan lele menghasilkan 750,59 ton/tahun, dan ikan mas menghasilkan 250 ton/tahun (Profil Kecamatan Sambutan, 2022).

B. Sektor usaha yang berpotensi dikelola BUMD Kota Samarinda

Potensi daerah pada dasarnya merujuk pada berbagai sumber daya yang terdapat dalam suatu wilayah, serta mencakup aspek-aspek yang menjadi modal awal untuk dapat mengembangkan dan memajukan suatu wilayah. Di era otonomi daerah seperti saat ini, Pemerintah Daerah dan *stakeholder* lainnya dituntut untuk dapat terlibat dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Badan usaha milik daerah (BUMD) dapat menjadi mesin perekonomian bagi daerah. Melalui kepemilikan sahamnya yang besar di perusahaan, pemerintah daerah selaku pemilik saham dapat mendorong peran BUMD lebih optimal lagi dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah melalui dividen yang diterima dari keuntungan perusahaan.

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah sektor potensial untuk dapat dikembangkan. Pengelolaan sektor-sektor tersebut dapat dilakukan melalui peran BUMD. Berdasarkan karakteristik Kota Samarinda seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa potensi daerah yang berpotensi untuk dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berikut adalah beberapa potensi daerah di Kota Samarinda yang dapat dikelola oleh BUMD:

1. Pengelolaan Pasar Rakyat. Saat ini, pengelolaan pasar rakyat di Kota Samarinda berada dalam kewenangan Dinas Perdagangan Kota Samarinda melalui UPTD Pasar Pagi dan UPTD Pasar Segiri. Secara teknis, kedua UPTD tersebut membawahi 12 pasar rakyat lainnya. Besarnya ruang lingkup pengelolaan terhadap pasar rakyat di Kota Samarinda berdampak pada belum terwujudnya pengelolaan pasar tradisional menjadi pasar sehat dan tematik wisata (LKJiP Dinas Perdagangan, 2023). Selain itu, pengelolaan pasar rakyat di Kota Samarinda yang hanya ditangani oleh UPTD belumlah efektif, padahal terdapat potensi untuk dapat meningkatkan PAD melalui sektor tersebut (Dinas Pertanian, 2023).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 07 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasar Rakyat dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasar rakyat sangat mungkin dikelola oleh BUMD, jadi UPT bisa lebih fokus menangani inflasi dan bapokting (bahan pokok dan penting) (wawancara dengan Dinas Perdagangan, 2023).

Dengan dikelolanya pasar rakyat oleh BUMD, diharapkan dapat berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*) tanpa mengesampingkan faktor kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pasar melalui BUMD menjadi langkah penting sebagai pertumbuhan dan pengembangan pasar rakyat di Kota Samarinda. Sehingga pengelolaan pasar rakyat dapat lebih berkembang tanpa tergantung pada sumber dana dari pemerintah. Beberapa responden yang melakukan pengisian survey terkait potensi kajian juga menyatakan bahwa pengelolaan pasar rakyat juga berpotensi untuk dikelola BUMD. Contoh pengelolaan pasar yang dilakukan oleh BUMD adalah pada Perumda Pasar Jaya yang merupakan salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Perumda Pasar Jaya sukses menyetorkan deviden bagian Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 55.037.731.935 di tahun 2021 dan Rp 3.848.042.866 di tahun 2022 (<https://bpbumd.jakarta.go.id/>).

“Kalau ada perbaikan-perbaikan, swasta kan bisa langsung, kalau di pemerintah kan harus dianggarkan dulu, karena kita mau intervensi langsung tidak bisa. Secara keseluruhan, kalau diserahkan di BUMD saya yakin pasti akan sangat menguntungkan” (wawancara dengan Dinas Perdagangan, 2023)

Dengan pengelolaan pasar melalui BUMD, diharapkan pasar rakyat di Kota Samarinda dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang modern dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kota Samarinda.

2. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU). Kota Samarinda memiliki potensi yang sangat besar pada sektor pemotongan hewan dan unggas, namun saat ini masih belum mencapai tingkat produktivitas yang optimal dalam operasionalnya. Tidak maksimalnya pengelolaan RPH dan RPU dikarenakan terbatasnya anggaran, sebab untuk menyiapkan sistem semi modern, diperlukan investasi besar (kaltimtoday.co). Meskipun demikian, terdapat potensi yang signifikan dengan potensi penyembelihan minimal 40.000 ekor setiap harinya (hasil wawancara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023). Untuk memaksimalkan potensi ini dan menjadikannya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda, maka sektor ini berpeluang untuk dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melalui pengelolaan yang efektif dan efisien oleh BUMD, diharapkan RPH dan RPU dapat menjadi sektor yang berpotensi memberikan kontribusi ekonomi bagi Kota Samarinda serta dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Contoh BUMD yang mengelola RPH adalah Perumda Dharma Jaya di DKI Jakarta dan Perusahaan Daerah (PD) RPH Surya di Surabaya.

3. Industri pengolahan Jagung: Jagung merupakan salah satu produk hasil perkebunan yang memiliki dimensi penggunaan/pemanfaatan sangat luas, seperti untuk pakan ternak (langsung ataupun olahan), pangan pokok bagi penduduk, bahan baku industri dan lainnya. Mayoritas penggunaan bahan baku jagung saat ini adalah sebagai bahan baku utama industri pakan ternak (Bantacut, Akbar, dan Firdaus, 2015). Sementara ini, di Provinsi Kalimantan Timur belum ada industri yang bergerak di sektor pengolahan jagung, terutama sebagai olahan bahan pakan ternak (hasil wawancara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023). Bahan pokok jagung sejatinya juga dapat diambil dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekitarnya.

Terdapat sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh BUMD Kota Samarinda untuk dapat bergerak di sektor industri pengolahan jagung. Hal tersebut juga didukung oleh ketersediaan lahan potensial yang dapat ditanami komoditas jagung. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (2023), Komoditas jagung memiliki produktivitas jagung sebesar 39 Kuintal/Ha, dengan luas panen 70.56 Ha di tahun 2022. Selain itu, pangsa pasar pakan ternak juga memiliki peluang ekonomi yang bagus, karena selain bisa menyuplai pakan ternak untuk peternak di Kota Samarinda, juga dapat menyuplai pakan ternak bagi peternak di Provinsi Kalimantan Timur secara umum. Dalam jangka panjang, apabila industri pakan ternak dapat didirikan di Kota Samarinda, kemungkinan besar dapat berdampak pada stabilnya harga ternak ataupun ikan di Kota Samarinda, karena tidak lagi bergantung pada *supply* pakan ternak dari daerah lain. Contoh BUMD pengolahan pakan ternak dilakukan oleh PT. Food Station Tjipinang Jaya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4. Pengelolaan Parkir. Kota Samarinda memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir yang sangat menjanjikan. Hal tersebut tergambar dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda, berdasarkan data Korlantas Polri (2023), jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda hingga 19 Juni 2023 adalah 946.475 unit kendaraan, menjadikannya yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Tentu pengelolaan lahan parkir yang profesional dapat menjadi sumber PAD bagi Pemerintah Kota Samarinda.

Saat ini pengelolaan parkir yang sudah terkelola dengan baik adalah pada sejumlah perhotelan dan swalayan. Sedangkan, jenis parkir di jalan (*on street parking*) atau parkir di jalan umum belum terkelola dengan baik. Pemanfaatan parkir di jalan umum sebenarnya sudah berjalan melalui skema *e-parking* dengan metode pembayaran melalui QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*), tetapi implementasinya masih belum berjalan dengan baik, beberapa pengguna parkir masih ada yang memilih pembayaran secara tunai. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia masih menjadi

kendala karena belum terbiasa menerapkan kebijakan digitalisasi tersebut. Para juru parkir yang seharusnya mengarahkan pengguna parkir untuk melakukan pembayaran melalui QRIS, tetapi malah menerima pembayaran secara tunai (<https://kaltimpost.jawapos.com/>). Selain potensi pada parkir di jalan umum, terdapat potensi untuk memanfaatkan aset gedung Plaza 21 Kota Samarinda sebagai lahan parkir elektronik (wawancara dengan Varia Niaga, 2023).

Selain pengelolaan parkir kendaraan umum, terdapat juga potensi dari pengelolaan parkir untuk kendaraan berat yang selama ini banyak menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir sementara. Misalkan dengan memanfaatkan tanah Pemerintah Kota Samarinda yang belum difungsikan untuk dijadikan sebagai kantong parkir. Sehingga tidak ada alasan bagi para sopir kendaraan berat untuk memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Terdapat beberapa titik yang betul-betul tidak terkontrol sehingga menimbulkan parkir kontainer di beberapa ruas jalan. Sehingga keberadaan kontainer dapat membahayakan nyawa masyarakat (wawancara dengan Varia Niaga, 2023). Contoh BUMD pengelolaan parkir adalah Perumda Parkir Makassar Raya, dimana laba dari sektor parkir tahun 2022 meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 2021.

5. Pengembangan sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor basis dalam struktur PDRB Kota Samarinda. Hal itu juga didukung oleh laju pertumbuhan dan kontribusi sektor konstruksi yang berada pada kategori tinggi terhadap struktur PDRB Kota Samarinda. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat potensi pengembangan pada sektor tersebut. Sektor Konstruksi sebenarnya pernah dilaksanakan oleh BUMD Varia Niaga, tetapi tidak berkembang dan mati (wawancara dengan Varia Niaga, 2023). Secara keseluruhan, pengembangan sektor konstruksi di Kota Samarinda memiliki potensi yang menjanjikan, terutama dalam konteks pertumbuhan kota yang masif dan peran Kota Samarinda sebagai mitra Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Contoh jasa konstruksi dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk yang menyediakan jasa konsultasi bidang perencanaan dan pembangunan.
6. Transportasi massal. Salah satu permasalahan umum di Kota Samarinda adalah kemacetan, terutama di jam-jam sibuk seperti jam berangkat kerja dan pulang kerja. Beberapa ruas jalan yang sering mengalami kemacetan lalu lintas adalah ruas jalan Ir. H. Juanda, jalan P. Antasari, jalan Mayjend. MT. Haryono dan jalan P. Suryanata. Kemacetan dan panjang antrian semakin terlihat di simpang 4 Air Putih, karena titik tersebut merupakan pusat akumulasi kendaraan dari kawasan pelabuhan, pasar pagi, terminal sei kunjang, pergudangan, dan sekitarnya yang juga merupakan pusat

pertokoan, sarana perkantoran, sarana pendidikan, serta permukiman padat penduduk (Rakhman, 2017).

Untuk mengurai permasalahan tersebut, perlu penyediaan transportasi publik yang memadai dan terintegrasi. Kondisi saat ini, Kota Samarinda belum memiliki moda angkutan massal yang representatif. Konsep pengembangan transportasi massal tersebut dapat melihat pengelolaan bus trans Jakarta, trans Jogja, ataupun trans Banjarmasin. Selain dapat membantu pemerintah untuk mengurangi intensitas kepadatan di beberapa ruas jalan Kota Samarinda, moda transportasi massal juga dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas transportasi massal yang murah dan cepat. Transportasi massal yang murah dan cepat dapat memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi penduduk, terutama mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Ini juga dapat mengurangi polusi udara dan emisi karbon, sehingga berdampak positif pada lingkungan dan kualitas udara Kota Samarinda.

Ke depan dengan perpindahan IKN yang kian dekat, upaya penyiapan berbagai moda transportasi massal juga perlu segera dimatangkan. Khususnya pada transportasi diatas rel seperti kereta api, MRT, serta LRT. BUMD Kota Samarinda dapat memainkan peran untuk penyiapan moda tersebut dengan dukungan investasi dari Pemerintah Kota Samarinda.

7. Pengembangan sektor industri olahan perikanan tangkap dan budidaya. Salah satu komoditas unggulan di Kota Samarinda adalah produksi ikan lele dan ikan nila, bahkan produksi ikan lele Kota Samarinda merupakan yang tertinggi di Provinsi Kaltim yaitu sekitar 600 ton/tahun (wawancara dengan Dinas Perikanan, 2023). Melimpahnya hasil produksi ikan lele dan ikan nila di Kota Samarinda seharusnya diikuti oleh industri/usaha pengolahannya. Pengolahan hasil perikanan tersebut merupakan salah satu cara untuk memperpanjang daya simpan ikan. Sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan efisiensi pemanfaatan hasil perikanan. Pengolahan ikan lele menjadi produk turunan seperti nugget misalnya, mampu meningkatkan nilai tambah dari tiap harga jualnya (Sofia dan Yunita, 2021). Hal tersebut juga didukung ketersediaan 2 *mini cold storage* dengan kapasitas tamping 15 ton/*storage* yang saat ini dimiliki oleh BUMD Varia Niaga. Pengembangan produksi hasil olahan tersebut dapat diinisiasi oleh BUMD Varia Niaga. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang mengembangkan sektor perikanan dengan menjalankan program Pembudidaya Ikan Milenial (PIM), yang dikerjasamakan dengan BUMD PT. Agro Jabar.
8. Pemasaran hasil UKM, beragamnya hasil produksi UKM di Kota Samarinda tentu membutuhkan lapak penjualan dan pemasaran. BUMD Varia Niaga saat ini memiliki

unit bisnis berbentuk minimarket yang bernama Bebaya Mart (wawancara dengan Varia Niaga, 2023). Pengembangan usaha retail seperti Bebaya Mart dinilai dapat berpeluang ekonomi. Bebaya Mart yang direncanakan akan dibangun di setiap Kecamatan juga dapat membantu dalam distribusi bapokting secara cepat. Tetapi dalam persaingan pasar akan menghadapi mini market sejenis yang lebih dulu eksis di Kota Samarinda.

9. Pengelolaan sampah. Mekanisme pembuangan sampah di Kota Samarinda hanya berakhir di TPA, belum ada konsep untuk memanfaatkannya sebagai sumber energi. Pengelolaan sampah sangat mungkin untuk dikerjasamakan dengan BUMD, karena dibalik frase negatif tentang sampah, terdapat pula potensi untuk memanfaatkannya mejadi sebuah energi. Beberapa responden juga menyatakan bahwa sektor pengelolaan sampah merupakan salah satu sektor yang dapat dikelola oleh BUMD (hasil survey kajian Potensi, 2023). Contoh pengelolaan sampah yang dapat bernilai ekonomi adalah pengolahan sampah yang dilakukan oleh UPTD TPA Manggar Kota Balikpapan Bersama dengan Pertamina Hulu Mahakam yang memanfaatkan tumpukan sampah di TPA Manggar menjadi gas metana. Melalui gas metana ini dapat membantu masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai pengganti Gas LPG, dan dapat digunakan untuk memasak (kompas.com). Contoh lainnya adalah BUMD Bank Sampah Malang (BSM) yang memanfaatkan daur ulang sampah menjadi bentuk baru seperti tas, dompet, tempat tisu, dan tempat alat tulis.
10. Pengelolaan limbah dan daur ulang merupakan salah satu sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang kurang, tetapi memiliki kontribusi lebih besar terhadap PDRB Kota Samarinda. Melihat hal tersebut, maka terdapat sebuah peluang untuk mengelola sektor layanan pengelolaan lumpur tangki septik (sedot tinja). Layanan penyedotan lumpur sedot tinja juga meliputi layanan pengolahan lumpur tangki septik yang dilakukan melalui instalasi pengolahan lumpur tinja. Instalasi pengolahan lumpur ini juga sebagai salah satu tindakan preventif untuk mencegah pembuangan lumpur tinja disembarang tempat, sehingga selain terdapat potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, juga terdapat unsur pengelolaan lingkungan yang baik.

Saat ini layanan sedot tinja dilaksanakan oleh Dinas PUPR melalui UPTD. Semakin bertambahnya jumlah bangunan di Kota Samarinda juga kian memperbesar peluang usaha di sektor sedot tinja dan pengolahannya. Selain itu, adanya himbuan bahwa tangki septik yang baik perlu disedot secara berkala, setidaknya 1 kali dalam 3 tahun (SNI 2398:2017). Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka sektor pengelolaan

limbah atau sedot tinja dapat juga dikelola oleh BUMD, karena terdapat peluang ekonomi didalamnya.

Beberapa BUMD yang bergerak dalam sektor pengolahan limbah adalah Perumda Paljaya, yang merupakan salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Melalui sektor tersebut Perumda Paljaya berhasil menyetorkan deviden bagian Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 13.955.414.896 di tahun 2022 (<https://bpbumd.jakarta.go.id/>). Terdapat juga PT. Pratama Jatim Lestari yang menjadi pusat pengolahan limbah B3 terbesar dan terbaik di Jawa Timur.

"Sedot tinja ini merupakan salah satu kegiatan yang ada di DPUPR yang ditangani oleh UPTD untuk melakukan sedot tinja rutin untuk warga Samarinda. Ini tergantung kapan warga menghubungi untuk melakukan penyedotan" (wawancara dengan Dinas PUPR, 2023)

11. Pengelolaan air minum kemasan dan es kristal. Sektor air merupakan sektor basis di Kota Samarinda. Menindaklanjuti hal tersebut, maka terdapat peluang bisnis bagi BUMD untuk melakukan diversifikasi produk hasil olahan air menjadi sebuah produk air minum dalam kemasan (botol ataupun galon). Selanjutnya, investasi air minum dalam kemasan relatif tidak membutuhkan modal yang besar, karena sejalan dengan bisnis inti BUMD PDAM Tirta Kencana. Terlebih lagi kualitas air yang dihasilkan oleh instalasi PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda sudah pada level layak minum (wawancara dengan PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda, 2023). Selain itu, untuk pengelolaan air dari PDAM Tirta Kencana juga berpotensi dikerjasamakan dengan BUMD Varia Niaga untuk menjual air layak minum ke kapal-kapal yang bersandar di Kota Samarinda (wawancara dengan Varia Niaga, 2023).

Es kristal juga berpotensi di kelola oleh BUMD Tirta Kencana Kota Samarinda, mengingat masifnya pertumbuhan cafe dan restoran yang pada tahun 2022 mencapai 270 unit dan jumlah rumah makan yang mencapai 198 unit, serta kebutuhan sektor lainnya yang membutuhkan keberadaan es kristal. Permintaan es kristal terbilang cukup tinggi dan menjadi pilihan konsumen dibandingkan es balok karena lebih praktis, higienis, dan berkualitas. Perumdam Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu contoh Perumdam yang memiliki inovasi dengan bisnis es kristal, bahkan bisnis ini lebih menggiatkan dari bisnis air bersih.

12. Sektor periklanan luar ruangan (reklame, videotron, megatron). Beberapa kawasan yang terbilang cukup ramai di Kota Samarinda telah memiliki sarana reklame dan videotron yang dapat dikelola oleh BUMD dan memiliki potensi pendapatan yang cukup besar terlebih dengan sektor jasa dan perdagangan yang menjadi ciri khas Kota Samarinda menjadikan sektor periklanan ini cukup menjanjikan. Periklanan luar ruangan ini masih cukup potensial disamping periklanan digital yang saat ini juga cukup marak digunakan. Untuk itu, penambahan sarana periklanan di beberapa titik/kawasan di Kota Samarinda dapat dilakukan untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas.
13. Sektor Keuangan. Dalam rangka penguatan literasi dan inklusi keuangan untuk siswa-siswa di Kota Samarinda, BUMD (BPR) yang bergerak di sektor keuangan dapat mengembangkan program tabungan khusus untuk pelajar. Terdapat potensi yang cukup besar dengan menjadikan pelajar sebagai target pemasarannya. Melihat data jumlah siswa SD/ sederajat hingga SMA/ sederajat yang mencapai 174.732 orang siswa (BPS, 2023), maka ceruk pasar ini dapat dimanfaatkan oleh BPR Kota Samarinda dalam rangka melebarkan sayap bisnisnya, jadi tidak hanya menysasar UKM saja. Beberapa BUMD BPR juga memiliki program Simpanan Pelajar salah satunya adalah Perumda BPR Bank Jogja, PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dan PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).
14. Pengembangan sektor pariwisata melalui penyediaan paket wisata (*travel tour*) wilayah Kota Samarinda. Berdasarkan pemetaan potensi ekonomi yang dilakukan serta arah kebutuhan penunjang IKN nantinya, sektor pariwisata memiliki potensi cukup tinggi (wisata budaya, wisata sungai, maupun wisata alam lainnya) dan bahkan hampir di setiap kecamatan memiliki potensi wisata yang dapat dikelola dan dikembangkan. Potensi wisatawan diproyeksikan juga akan cukup meningkat ditengah keberadaan IKN nantinya sehingga mendorong peluang besar bagi BUMD untuk dapat mempersiapkan paket-paket wisata dengan dukungan dari instansi terkait. Salah satu contoh BUMD yang bergerak di bidang pariwisata adalah PT. Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perseroda) Provinsi Jawa Barat.

Pembiayaan daerah, *budget policy* (kebijakan pembiayaan) pemerintah daerah dapat diarahkan untuk melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal ini terbuka bagi Pemerintah Daerah baik kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam mengelola potensi daerah, BUMD perlu melibatkan penelitian yang cermat, perencanaan yang matang, manajemen yang efektif, serta kolaborasi dengan pihak terkait. Dengan pendekatan yang tepat, BUMD dapat berperan penting dalam

memanfaatkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Samarinda.

C. Strategi Penguatan BUMD

Untuk mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Samarinda, maka diperlukan langkah-langkah penguatan ke depan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda, yaitu:

1. Optimalisasi bidang usaha BUMD yang dikelola melalui anak perusahaan (*subsidiary companies*) atau mendelegasikan pada divisi baru di BUMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, menyebutkan bahwa pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang dibentuk. PP ini mengisyaratkan cukup sulitnya untuk membentuk BUMD baru, dan pendirian BUMD diharapkan juga memberi keuntungan/ laba dan justru tidak menambah beban APBD Kota. Saat ini di Samarinda, telah ada tiga (BUMD), yakni BPR, PDAM Tirta Kencana, dan Varia Niaga. Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda, menyebutkan banyaknya bidang usaha (22 bidang usaha) untuk Varia Niaga dan bahkan memberi peluang cakupan usaha pada poin terakhir, yakni “usaha-usaha lain dan jasa yang dianggap sah”. Dengan berbagai potensi ekonomi yang berpeluang dikelola oleh BUMD, maka pembentukan anak perusahaan atau divisi khusus dalam pengelolaan BUMD menjadi pilihan terbaik dibandingkan membentuk BUMD baru. Skema ini tentu membutuhkan dukungan tambahan sumberdaya profesional dan kompeten namun tetap dalam kontrol dan pengawasan BUMD induk sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja BUMD dan menciptakan nilai pasar perusahaan.

2. Koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk menciptakan peluang bagi pengembangan BUMD.

Dalam pelaksanaannya, BUMD dapat berkolaborasi dengan semua pihak. BUMD dapat berkolaborasi dengan BUMD lainnya, misalnya antara PDAM dengan Varian Niaga, serta BPR. Kolaborasi dengan BUMD lain di daerah (kabupaten/kota lainnya), seperti yang telah dilakukan Varian Niaga dengan BUMD Pinrang. Kolaborasi dengan swasta (b to b) misal PDAM dengan swasta dalam penyediaan air bersih bagi kapal bongkar muat dan lainnya, juga BUMD dengan masyarakat, termasuk dengan BUMKel dan BUMRT, dengan pengembangan Bebaya Mart. Juga kolaborasi BUMD dengan BUMN (misalnya kewenangan di pusat, sehingga membuat “usaha patungan”, atau dengan pembagian

BUMN untuk produksi dan pemasaran, sedangkan BUMD untuk pengelolaan operasional, perijinan dan SDM).

3. Pemanfaatan potensi Ekonomi daerah dengan memperhitungkan pihak swasta yang mengelola sektor tersebut, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Kota Samarinda.

Saat ini, tiga (3) sektor kontributor terbesar pada perekonomian Kota Samarinda adalah sektor kontruksi (20,51 %), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,07 %), dan sektor pertambangan dan penggalian (15,66%). Dari hasil analisis LQ dan Tipologi Klassen, teridentifikasi beberapa sektor yang merupakan sektor basis, dan unggulan di Samarinda, yakni sektor kontruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa lainnya.

Sektor kontruksi dan sektor perdagangan menjadi sektor basis (LQ) dan merupakan unggulan (Kuadran I) dengan laju pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi.

- a) Saat ini, Perumda Varia Niaga telah memiliki Divisi Pergudangan dan Rusunawa. Namun pelaksanaan lebih kepada pengelolaan, baik Rusunawa Tower I dan Tower 2 Sei Kunjang, Rusunawa Harapan baru, dan Rusunawa Wanyi. Sektor kontruksi menjadi sektor basis dan unggulan di Samarinda, dan prospek dengan hadirnya IKN diharapkan akan terus berkembang, namun dibutuhkan sumber daya cukup besar, disamping faktor lainnya. BUMD dapat mengambil peran di sektor jasa pendukung, atau juga berkolaborasi baik dengan BUMN atau swasta untuk berbisnis di sektor ini.
- b) Sektor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Selain sektor kontruksi, sektor perdagangan juga merupakan unggulan, bahkan menjadi jargon Kota Samarinda sebagai kota perdagangan dan jasa. Di Sektor perdagangan, saat ini Varia Niaga diberi kepercayaan Pemerintah Kota menjalankan Bebaya Mart yang berfokus pada distribusi dan perluasan usaha pangan serta berperan aktif dalam menjaga kestabilan pangan di Kota Samarinda. Telah ada rencana ke masyarakat (kolaborasi dengan BUMKel) untuk Bebaya Mart di RT, dan juga rencana adanya Bebaya Grosir. Penggunaan aplikasi juga dilakukan untuk mempermudah layanan.

Dari hasil penyebaran kuisisioner-pun, muncul beberapa harapan akan peran BUMD dalam pengelolaan pasar dan komoditas pangan mengingat Samarinda sebagai ibukota provinsi dan menjadi mitra IKN nantinya. BUMD sebaiknya ikut 'mengambil peran' dalam pengelolaan pasar rakyat. Dengan dikelolanya pasar rakyat oleh BUMD, diharapkan dapat berorientasi pada keuntungan (*Profit-oriented*), sementara UPT bisa lebih fokus menangani inflasi dan bapokting (bahan pokok dan penting). Pengelolaan pasar melalui BUMD menjadi langkah penting sebagai pertumbuhan dan pengembangan pasar rakyat di Kota Samarinda.

Selain sektor-sektor tersebut, beberapa sektor potensial (K2) seperti sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, juga sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dapat menjadi luasan cakupan sektor peningkatan ekonomi di Samarinda.

- c) Hasil penggalan data melalui penyebaran kuisisioner juga mendapati perlunya BUMD mengambil peran di bidang transportasi masal. Semakin banyaknya jumlah kendaraan dari kapasitas jalan pada saat jam sibuk apalagi dengan asumsi sebagai mitra IKN nantinya, perlu mempermudah akses ke tempat-tempat layanan umum masyarakat, tol, serta bandara maka sangat dibutuhkan pengelolaan transportasi yang baik dan terintegrasi. Pengelolaan parkir di Kota Samarinda seharusnya juga potensial untuk dikembangkan. Pemanfaatan parkir di jalan umum sebenarnya sudah berjalan melalui skema *e-parking* dengan metode pembayaran melalui QRIS, tetapi implementasinya masih belum berjalan dengan baik terkait beberapa kendala. Ada potensi untuk pengelolaan parkir kendaraan berat yang selama ini banyak menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir sementara. Misalkan dengan memanfaatkan tanah Pemerintah Kota Samarinda yang belum difungsikan untuk dijadikan sebagai kantong parkir.
- d) Sektor jasa sangat potensial untuk dilaksanakan oleh BUMD, jika SDM-SDM daerah, khususnya bidang jasa juga cukup tersedia di daerah. Perangkat daerah (misal pariwisata) juga telah menyiapkan/ melatih SDM-SDM daerah sehingga BUMD juga bisa 'bermain' di sektor jasa.
- e) Sektor pengadaan air saat ini dikelola oleh PDAM Tirta Kencana. Terdapat peluang bisnis bagi BUMD untuk melakukan diversifikasi produk hasil olahan air menjadi sebuah produk air minum dalam kemasan. Selain itu, untuk pengelolaan air dari PDAM Tirta Kencana juga berpotensi dikerjasamakan dengan BUMD Varia Niaga untuk menjual air layak minum ke kapal-kapal yang bersandar di Kota Samarinda.

- f) Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang berpotensi untuk dikelola BUMD dengan berkolaborasi, baik dengan BUMN, swasta atau bahkan dengan masyarakat untuk dapat dimanfaatkan, salah satunya menjadi energi.
- g) Meskipun dari hasil LQ dan Kalssen, sektor pertanian (arti luas) serta sektor pertambangan dan penggalian didapat hasil non basis dan bukan unggulan, namun dari hasil penggalian data disarankan pada pengembangan potensi tanaman jagung yang menjadi bahan baku pakan ternak.
- h) Pada BUMD perkebunan, pemerintah meyakinkan masyarakat memilih profesi bertani menjadi hal yang menguntungkan dari segi ekonomi dengan membantu dari awal mulai dari pemanfaatan lahan eks tambang yang sudah di reklamasi menjadi lahan perkebunan, pemberian bibit, promosi wisata ke daerah lain sebagai ikon baru Kota Samarinda.

4. Penguatan pengelolaan dan kapasitas SDM BUMD yang profesional serta manajemen yang berkualitas dan transparan.

Tidak seperti perusahaan swasta, BUMD tentunya mendapatkan kemudahan-kemudahan fasilitas, termasuk permodalan, perijinan, dan diawasi oleh orang-orang berkualitas (kompeten) sehingga diharapkan mampu bersaing. Komitmen pimpinan daerah untuk menghadirkan direksi yang kompeten dan profesional sehingga BUMD mampu memberikan pelayanan publik yang prima, juga mendapatkan laba (menggaet bisnis yang menguntungkan) serta operasionalnya yang 'sehat'. BUMD sehat dan berjalan baik, harus dikelola dengan baik, dengan *marketing* yang baik, dan bisa mendatangkan investasi yang baik.

5. BUMD perlu melakukan inovasi-inovasi agar usahanya dapat berkembang baik dan memberikan pendapatan yang optimal.

Inovasi menjadi kunci sukses BUMD dalam melaksanakan fungsinya. Beberapa terobosan pengembangan dan pengelolaan sektor usaha perlu dilakukan agar dapat kompetitif dan bersaing dengan perusahaan swasta lainnya. BUMD Kota Samarinda perlu melakukan kolaborasi ditengah keterbatasan anggaran, SDM, serta dalam rangka perluasan pangsa pasar. BUMD juga perlu melakukan program inovatif yang mendukung pengembangan UKM. Rencana adanya BUMKel, selain BUMD Varia Niaga, BUMD BPR (Bank Perkreditan Rakyat) juga dapat ikut berperan disini. Jika dimungkinkan, program-program ProBebaya di RT (khususnya infrastruktur), agar pelaksanaan di lapangan sesuai perencanaan RT, dimungkinkan adanya kredit infrastruktur dari BUMD BPR yang memberi manfaat bagi RT/Kelurahan untuk menyelesaikan pembangunan secara tepat waktu. Pada saat dana ProBebaya belum cair, maka kredit infrastruktur akan menjadi solusi untuk membiayai

pembangunan dengan tentunya maksimal plafon pinjaman yang dapat disediakan BUMD BPR.

BUMD PDAM Tirta Kencana yang mengelola hajat hidup masyarakat Samarinda, perlu terus mendengarkan dan merespons keluhan, melakukan perbaikan layanan, perluas cakupan layanan serta penguatan dan perbaikan infrastruktur (khususnya distribusi air bersih), bahkan menjadi benar-benar air layak minum. Sektor-sektor yang banyak bersentuhan dengan masyarakat menjadi kebutuhan sepanjang masa masyarakat. BUMD juga harus memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat dan dunia usaha di Kota Samarinda serta mampu menjadi perusahaan yang dapat bersaing dengan perusahaan swasta.

Perkembangan teknologi saat ini juga menuntut kemampuan adaptasi yang cepat oleh BUMD Kota Samarinda. Penggunaan teknologi dalam proses bisnis BUMD akan memudahkan konsumen serta dalam rangka mempercepat proses produksi maupun penyediaan jasa yang diperlukan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kajian ini telah mencapai beberapa hal yang dijadikan kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan perhitungan *Location Quotient* (LQ), diperoleh hasil sebanyak 3 sektor PDRB masuk dalam sektor non basis, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri Pengolahan. Sedangkan sebanyak 21 sektor lainnya masuk dalam sektor basis. Selain menggunakan LQ, penentuan sektor unggulan juga menggunakan perhitungan tipologi Klassen yang hasilnya dikelompokkan ke dalam empat kuadran menurut komoditasnya, yaitu Komoditas Prima, Komoditas Potensial, Komoditas Berkembang, dan Komoditas Terbelakang. Hasilnya, 11 sektor atau sebesar 52% dari seluruh sektor PDRB dikelompokkan dalam komoditas prima atau berada pada Kuadran I.
2. Beberapa sektor yang memiliki potensi ekonomi di Kota Samarinda, antara lain di Sektor pertanian berpotensi di komoditas jagung, di sektor peternakan memiliki potensi produksi unggas terutama ayam beku, sedangkan di sektor perikanan memiliki potensi budidaya ikan keramba. Di sektor koperasi, UKM dan perindustrian, Kota Samarinda telah memiliki industri produk unggulan di masing-masing kecamatan. Di sektor perdagangan, memiliki potensi pengelolaan pasar rakyat dan pemanfaatan *Bebaya Mart*. Di sektor air, potensi yang menonjol adalah pemberian layanan air bersih di kapal.
3. Adapun sektor usaha yang berpeluang dikelola BUMD Kota Samarinda terdiri dari 13 potensi yaitu: pengelolaan pasar rakyat, rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU), industri pengolahan jagung, pengelolaan parkir, pengelolaan sektor konstruksi khususnya di jasa konstruksi, transportasi masal, pengembangan sektor industri olahan perikanan tangkap dan budidaya, pemasaran hasil UKM, pengelolaan sampah, sektor pengelolaan limbah khususnya layanan pengelolaan lumpur tangka septik (sedot tinja), pengelolaan air minum kemasan dan es kristal. Di sektor keuangan, PT. BPR Kota Samarinda memiliki beberapa peluang yaitu mengembangkan program tabungan khusus pelajar, pembiayaan talangan program *Probahaya*, dan bisnis asuransi. Potensi terakhir yang dapat dikelola oleh BUMD adalah media iklan luar ruangan (*Out of Home Advertising*) yang dapat menjangkau banyak orang serta ditempatkan di area publik, serta penyediaan paket wisata (*travel tour*).
4. Lima strategi untuk mengoptimalkan peran BUMD Kota Samarinda adalah: optimalisasi bidang usaha BUMD yang dikelola melalui anak perusahaan (*subsidiary companies*) atau mendelegasikan pada divisi baru di BUMD, koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk menciptakan peluang bagi pengembangan BUMD, pemanfaatan potensi ekonomi daerah dengan memperhitungkan pihak swasta yang mengelola sektor tersebut, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Kota Samarinda,

penguatan pengelolaan dan kapasitas SDM BUMD yang profesional serta manajemen yang berkualitas dan transparan, serta BUMD perlu melakukan inovasi-inovasi agar usahanya dapat berkembang baik, dan memberikan pendapatan yang optimal.

B. Saran

Adapun beberapa saran kebijakan yang dapat diberikan pada kajian ini adalah:

1. Mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk mengoptimalkan 3 BUMD yang ada dalam melakukan ekspansi usaha atas potensi ekonomi yang telah diidentifikasi dalam kajian ini. Pembentukan BUMD baru saat ini (dengan ketentuan regulasi yang ada) tidak sederhana disamping juga harus mempersiapkan kebutuhan sumberdaya lainnya seperti SDM, direksi, sarana prasarana, dan lain-lain. Dengan demikian, memperkuat 3 BUMD yang ada merupakan pilihan terbaik dibandingkan membentuk BUMD baru. Adapun terhadap potensi ekonomi yang dapat dikelola BUMD, maka BUMD yang ada cukup mempersiapkan divisi unit usaha (*sub-holding*) dalam pengelolaan BUMD sebagai *holding company*.
2. Mendorong BUMD untuk mengelola beberapa potensi usaha yang telah diidentifikasi sebelumnya. Namun demikian, tentu terlebih dahulu perlu dilakukan analisis pasar dan pemasaran serta analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan aspek proyeksi aliran kas serta analisis manfaat atas biaya investasi. Dalam mengelola potensi daerah, BUMD perlu melibatkan penelitian yang cermat, perencanaan yang matang, manajemen yang efektif, serta kolaborasi dengan pihak terkait. Dengan pendekatan yang tepat, BUMD dapat berperan penting dalam memanfaatkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Samarinda.
3. Ketiga BUMD Kota Samarinda perlu menemukan DNA bisnis unggulan sehingga dapat ditingkatkan kapasitasnya untuk berkembang maksimal. DNA bisnis dapat diciptakan dan dibentuk untuk menemukan pola keberhasilannya. Selain itu juga diperlukan pembeda dengan produk serupa, yang nantinya akan menjadi *branding*/layanan BUMD. Sehingga tanpa promosi yang gencar, bisnis dapat berjalan dengan sendirinya.
4. Untuk mendukung kinerja BUMD, Pemerintah Kota Samarinda melalui perangkat daerah terkait juga perlu mempersiapkan program penguatan SDM seperti bagi pelaku usaha UMKM, pelaku usaha industri pengolahan ikan, serta petani/ kelompok petani sektor pertanian yang diharapkan juga dapat terlibat dalam sirkulasi pengembangan usaha BUMD nantinya.
5. Menjalankan kelima strategi kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya dan dapat dilaksanakan secara simultan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Khususnya pada penguatan SDM internal di masing-masing BUMD untuk mewujudkan manajemen yang berkualitas dan transparan, hal ini harus didukung oleh komitmen yang kuat dari pimpinan daerah agar investasi di Kota Samarinda meningkat. Disamping itu, terutama juga mendorong BUMD perlu melakukan inovasi yang dapat mendongkrak pendapatan BUMD dan berimbas pada peningkatan PAD Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

- Achmad, Awi. (2023). Dinas Perdagangan Samarinda Programkan Bebaya Mart di Setiap RT. Diakses di <https://www.insitekaltim.com/dinas-perdagangan-samarinda-programkan-bebaya-mart-di-setiap-rt/> tanggal 11 April 2023
- Alhusain, Achmad Sani. (2010). Analisa Potensi Sektor Usaha Strategis Daerah Sebagai Pertimbangan Kebijakan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). *Kajian*, 15(4), 663-694
- Amalia, Riski, dkk. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*, 31(1).
- Astuti, D. D. (2017). *ECONOMIC POTENTIAL MAPPING ANALYSIS IN THE DISTRICT OF JEMBER*. RELASI : JURNAL EKONOMI.
- Arsyad, Lincoln. (2005). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Azwina, R., Wardani, P., Sitanggang, F., & Silalahi, P. R. (2023). Strategi Industri Manufaktur dalam Meningkatkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 44–55.
- Busthomi. (2023). Bisnis Es Kristal Menguntungkan, Perumdam Tirta Lawu Karanganyar Terbukti Sukses Berinovasi. Diakses dari <https://www.topbusiness.id/73092/bisnis-es-kristal-menguntungkan-perumdam-tirta-lawu-karanganyar-terbukti-sukses-berinovasi.html> tanggal 27 Juni 2023
- bprbumidhana.co.id. (2023). PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bogor. Diakses dari <https://bprbumidhana.co.id/mitra-asuransi/> tanggal 27 Juni 2023
- bpbumd.jakarta.go.id. (2023). Profil BUMD Provinsi DKI Jakarta. Diakses dari <https://bpbumd.jakarta.go.id/web/bumd/PSRJY> tanggal 19 Juni 2023
- BPS Kota Samarinda. (2023). Kota Samarinda dalam Angka Tahun 2023
- BPS Kota Samarinda. (2022). Kota Samarinda dalam Angka Tahun 2022
- Dewi, L. E. (2022). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5035–5040. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1806>
- Ghalib, Rusli. (2005). *Ekonomi Regional*. Pustaka Ramadhan, Bandung

- Hamzah, S., Prestianawati, S. A., & Kusmawan, I. M. H. (2023). Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial*, 2(1), 41–55.
- Hastin, Mira. (2021). Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Memperkuat Daya Saing Daerah di Kabupaten Kerinci. *Jurnal AKRAB JUARA*, 6(1), 16-29
- Heryanto, B., Lubis, E., Muhajir, Riyanto, S., & Fauziah. (2022). Policy Directions for Optimizing Regional Owned Business Entities Management for Increasing Regional Income Based on Good Corporate Governance. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbaikan Syariah*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v6i1>.
- Ibrahim, dkk. (2021). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Unggulan di Kabupaten Pasuruan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(2), 145-152
- Juwita, A.H., Prasetyani, D., Sari, V.K (2021). Analisis Kebutuhan Daerah Untuk Pembentukan BUMD Pariwisata. *Forum Ekonomi*, 23(4), 663-668
- kalimantan.bisnis.com. (2022). Wali Kota Samarinda Minta BUMD Perbaiki Kinerja. Diakses dari <https://kalimantan.bisnis.com/read/20220804/407/1562862/wali-kota-samarinda-minta-bumd-perbaiki-kinerja> tanggal 15 Juni 2023
- kaltimtoday.co. (2022). Pemkot Samarinda Segera Maksimalkan RPH dan RPU Sungai Siring sebagai Aset Produktif. Diakses dari <https://kaltimtoday.co/pemkot-samarinda-segera-maksimalkan-rph-dan-rpu-sungai-siring-sebagai-aset-produktif> tanggal 2 Juni 2023
- kaltimpost.jawapos.com. (2022). Terbentur Budaya Membayar secara Tunai, Penerapan E-Parking Belum Maksimal. Diakses dari <https://kaltimpost.jawapos.com/samarinda/22/09/2022/terbentur-budaya-membayar-secara-tunai-penerapan-e-parking-belum-maksimal> tanggal 2 Juni 2023
- Kapur, S. L., Nabila, A. S. N., Safitri, W., Laras, Y. V. S., & Gravitiani, E. (2022). Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Kabupaten Banyuwangi. *JURNAL SeMaRaK*, 5(2), 67–80. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/smk/article/view/21395>
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2018). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Res Nurs Health*, 40(1), 1–24. <https://doi.org/10.21061/jcte.v21i1.647>
- kliksamarinda.com. (2023). Wali Kota Samarinda Sebut Anggaran Untuk Perumdam Tirta Kencana Demi Tingkatkan Kualitas Pelayanan. Diakses dari <https://kliksamarinda.com/wali-kota-samarinda-sebut-anggaran-untuk-perumdam-tirta-kencana-demi-tingkatkan-kualitas-pelayanan/> tanggal 11 April 2023
- Kuranto, A. J., & Arif, M. (2023). Analisis Kontribusi Perempuan Terhadap Perekonomian di

- Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 10(1), 207–216.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. In *The American Economic Review* (Vol. 1, p. 30). <https://www.jstor.org/stable/1811581>
- Hastin, Mira. (2021). Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Akrab Juara*, 6 (1), 16-29
- Marliza, Y., Indika, M., Syafitri, A., Wiguna. K.Y., Kusnadi. Subianto, S., Octavianie, R., Herawati, H. (2023). Analisis Kelayakan Usaha Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro di Kabupaten Musi Rawas Utara. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 11 (1). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. (2021). Naskah Akademik Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen.
- Nurmiati, Diana, F., & Murbayani. (2019). Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Seminar Nasional Sains, Teknologi, Dan Sosial Humaniora UIT 2019*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2014-2024
- Puslatbang KDOD. 2022. Policy Paper Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/Mitra Ibu Kota Nusantara. Lembaga Administrasi Negara-Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Samarinda
- Rachbini, Didik J. (2001). Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Rakhman (2017). Analisis Simpang Bersinyal Jalan Ir. H. Juanda-Jalan P. Antasari- Jalan Mayjend Mt. Haryono - Jalan P. Suryanata Kota Samarinda. *Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Sipil*, 1 (1).
- Raynita, Gadis (2022). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Status menjadi Perumda atau Perseroda. *Notary Law Journal*, 1(2), 176-203
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026
- <http://rc.korlantas.polri.go.id/>. (2023). Jumlah Data Kendaraan Polda Kalimantan Timur. Diakses dari <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=14&poldanya=KALIMANTAN%20TIMUR> tanggal 19 Juni 2023

- Riyadi, Ahmad. (2022). Dari Sampah Jadi Energi, Ratusan Warga di Balikpapan Kini Puas Memasak Tanpa Elpiji. Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2022/07/23/112706578/dari-sampah-jadi-energi-ratusan-warga-di-balikpapan-kini-puas-memasak-tanpa?page=all&lg_n_method=google tanggal 2 Juni 2023
- Safira, R., & Yafiz, M. (2022). Analisis Pengaruh Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Cakrawal Ilmiah (JCI)*, 1(7), 1887–1896.
- satudata.samarindakota.go.id. (2023). Kategori Produksi Perikanan Tangkap. Diakses di <https://satudata.samarindakota.go.id/kategori/1fdfab80-9755-11ec-a730-b5c02edb624d/produksi-perikanan-tangkap> tanggal 11 April 2023
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang
- Sofia dan Yunita. (2021). Peningkatan Nilai Ekonomi Hasil Perikanan: Pengembangan Bisnis Produk Olahan Berbasis Ikan Lele (*Clarias SPP*). *ILUNG: Jurnal Pengabdian Inovasi Lahan Basah Unggul*, 1(1) Juli 2021, 38-46.
- Tarigan, Robinson. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Umar, A. R. M. (2020). *Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Oleh Badan Usaha Milik Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Widodo, Tri. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Widyaningrum dan Cahyono. (2021). Sektor Basis Kabupaten Ngawi Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Independent: Journal Of Economics*, 1(1), 1-3
- Wijoyo, S., & Mashuri, M. A. (2021). Peningkatan Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur dalam Perspektif Ability, Motivation, Oportunity. *Inovasi*, 17(1), 10–18. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Yuliani, T. (2015). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3854>



KAJIAN PENYUSUNAN PETA POTENSI EKONOMI YANG DAPAT DIKELOLA BUMD KOTA SAMARINDA 2023

Kerjasama antara:
Bappedalitbang Kota Samarinda dan
Puslatbang KDOD LAN RI
<https://samarinda.lan.go.id/puskdod/>